

# Rakyat Merdeka

R.M.id  
Rakyat Merdeka

SEHATKAN MENTAL ANAK-ANAK

■ REDAKSI: 021- 53699507 (EXT 727) FAKS: 021- 53671716 ■ LAYANAN IKLAN: FAX: 021- 5333156 ■ SERVIS PELANGGAN: 021-53674444

Rp 9.000 (LUAR P JAWA Rp 11.000)

## Bansos & Bantuan Usaha Rakyat Berlanjut

# Pertumbuhan Ekonomi Membaik, Kisaran 5,3%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 ada dikisaran 5,3 persen. Proyeksi tersebut didukung konsumsi domestik yang tetap terjaga serta belanja pemerintah. Optimisme itu disampaikan Airlangga menjelang rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan diumumkan hari ini, Kamis (5/2/2026).



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

**EKSKLUSIF**

Dengan  
MENKO PEREKONOMIAN  
AIRLANGGA HARTARTO

“KELIHATANNYA pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 di atas 5 persen, sekitar 5 koma sekian. Saya sendiri lebih optimistis di kisaran 5,3 persen,” ujar Airlangga dalam wawancara dengan *Rakyat Merdeka* di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Memasuki 2026, pemerintah bersiap menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen. Berbagai upaya disiapkan sejak awal tahun. Misalnya mendorong konsumsi masyarakat sela-



SAPA MANTAN MENLU: Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (4/2/2026).

## BEI Bekukan 38 Emiten, Bareskrim Geledah 1 Sekuritas Saham Gorengan Dibersihkan

UPAYA pembersihan praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia terus bergulir. Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung membekukan perdagangan saham 38 emiten, sementara Bareskrim Polri menggeledah perusahaan sekuritas yang diduga menggoreng saham. BEI menyatakan sebanyak 38 emiten dibekukan karena tidak memenuhi ketentuan kepemilikan saham yang beredar di publik atau free float sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-A. Padahal, BEI

## Sekolah Rakyat Jadi Jaring Pengaman Pendidikan

# Gub NTT: Anak SD Bunuh Diri Tampanan Kemanusiaan

KISAH memilukan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang anak SD bunuh diri karena tak mampu beli pulpen dan buku. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menganggap kasus ini sebagai tampanan keras bagi kemanusiaan. Sekolah Rakyat sebagai tempat anak miskin menimba ilmu harus jadi jaring pengaman pendidikan.

Anak SD tersebut berinisial YBR. Usianya 10 tahun, merupakan siswi kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, NTT. Dia ditemukan tewas gantung diri di pohon Cingkih, tak jauh dari rumah bambu milik neneknya. Polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan saat mengevakuasi jasad korban. Dalam surat itu, YBR menyebut ibunya pelit. Selebihnya,

surat itu berisi ungkapan perpisahan kepada ibunya. Korban disebut sempat meminta uang kepada sang ibu untuk membeli buku dan pulpen. Sayangnya, permintaan itu tak bisa dikabulkan karena keterbatasan ekonomi. “Pengkakuan ibunya, ada permintaan dadi korban (uang beli buku tulis dan pulpen) sebelum meninggal,” kata Kepala Desa Naruwolo, Dion Roa.

Gubernur Laka Lena menilai, tragedi tersebut menjadi cermin kegagalan Pemerintah mendeteksi dan mencegah persoalan sosial yang menimpa anak-anak keluarga rentan. Menurutinya, peristiwa itu menjadi alarm keras bagi Pemerintah agar memperkuat langkah pencegahan. Ia mengakui, masih ada kelemahan dalam sistem perlindungan sosial yang

membuat kasus ini luput dari pengawasan. “Kami gagal untuk mendeteksi dan solusi untuk anak tersebut. Apa pun kisahnya ini adalah tampanan keras bagi kemanusiaan kita,” ujar Laka Lena, Rabu (4/2/2026). Meskipun terjadi di daerah pelosok, tragedi ini sudah menjadi perhatian

## Berpetualang Di Pegunungan Bersalju Swiss (1)

# Tersihir View Pegunungan Dari Balik Jendela Kereta



Salah satu kereta yang kami tumpangi dalam perjalanan di Swiss, dengan view pegunungan.

Jurnalisi *Rakyat Merdeka Kartika Sari*, mengikuti *Media Trip* bertajuk “Beginner’s Guide to Winter” pada 25–31 Januari 2026 di Swiss atas undangan *Switzerland Tourism di Indonesia*. Seluruh rangkaian acara digelar outdoor, di tengah hamparan salju. Kami menjajal olahraga snowboard, ski, sledding, snowshoe hiking dan thrill walk di alam pegunungan yang alami. Sebuah petualangan menantang yang memicu adrenalin, sekaligus jadi pengalaman yang mengesankan dan super fun. Berikut laporannya.

MENGUNJUNGI Swiss adalah salah satu mimpi saya sejak remaja. Saya sangat suka menonton tayangan serial televisi, film atau YouTube tentang para traveler atau adventurer yang menginjakkan kaki di Swiss, negara kaya dengan pemandangan

## Terkait Pajak Dan Bea Cukai

# KPK OTT Di Jakarta, Kalsel Dan Lampung

KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga tempat terkait dugaan korupsi di sektor pajak dan bea cukai, Rabu (4/2/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai miliaran rupiah serta emas seberat sekitar 3 kilogram. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merinci tiga lokasi OTT. Pertama, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), terkait dugaan korupsi restitusi pajak. Kedua, di Lampung,

dengan dugaan korupsi terkait bea dan cukai. Ketiga, di Jakarta, juga terkait bea dan cukai. “Di Kalimantan Selatan, petugas mengamankan tiga orang,” terang Budi, di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Budi menjelaskan, OTT di Kalimantan Selatan berkaitan dengan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perkebunan yang sedang diproses di Kantor Pelaporan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Dari tiga pihak yang diamankan, salah satunya merupakan Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. “Jadi, terkait dengan restitusi PPN yang diajukan pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin untuk nilai restitusi mencapai Rp 8 miliar,”

## Vox Populi

CATATAN  
Supratman

## Optimisme Yang Keliru

INI jelas tampanan keras. Sangat keras. Karena, sudah diingatkan, bahkan diancam, tapi korupsi jalan terus. Ini fenomena luar biasa. Sangat berbahaya.

Bayangkan, belum ada sebulan Menteri Keuangan Purbaya “mengancam” pejabat dan aparat Bea Cukai, eh, ancaman tersebut dibalas dengan pelanggaran riil. Dibalas kontan dengan tetap melakukan aksi korupsi.

Akhir Januari 2026, Purbaya bahkan mengancam akan merumahkan semua pejabat Bea Cukai dan menggantinya dengan lembaga swasta dari Swiss, seperti di era Orde Baru. Ternyata tidak (atau belum) mempan.

Rabu (4/2/2026) kemarin, Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan di Banjarmasin, Kalsel dan di Jakarta. Di Banjarmasin terkait restitusi pajak. Di Jakarta OTT terjadi di Bea Cukai.

Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa tak ada takut-takutnya? Seperti yang ada optimisme yang keliru. Ada keyakinan semu yang berkembang bahwa “risiko selalu menimpa orang lain. Bukan saya. Bukan hari ini. Bukan di ruang kerja saya”.

Keyakinan seperti ini berkembang karena ada perasaan “yang lain saja bisa lolos.” Atau, “saya sudah hati-hati dan bagi-bagi kok”. Atau, “KPK lagi fokus ke tempat lain, tidak mungkin ke sini”.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6

## Sosiologi Korupsi (27)

# Penggelapan (Gulul) Sebagai Sebuah Korupsi

GULUL merupakan salah satu cara meraih keuntungan yang tercela dan dapat dikategorikan sebagai praktik korupsi. Gulul adalah upaya mencari keuntungan dan harta kekayaan dengan cara-cara curang, seperti menipu, mengelabui, menggelapkan, dan lain sebagainya. Harta kekayaan yang diperoleh melalui praktik gulul adalah haram dan tidak membawa berkah. Banyak ayat Al-Qur’an dan hadis yang mencela sifat serta praktik gulul, antara lain firman Allah Swt. “Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, ma-

ka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan atas apa yang telah dikerjakannya dengan pembalasan yang setimpal, dan mereka tidak dianiaya.”(QS Ali ‘Imran [3]: 161) Dalam hadis Nabi juga banyak dijumpai ketegasan Rasulullah Saw. terhadap para pelaku kecurangan, dan beliau sendiri mencontohkan sikap anti-kecurangan tersebut. Suatu ketika Rasulullah Saw. mengangkat Ibnu Utaiyah untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Setelah kembali

dan menghadap Rasulullah, Ibnu Utaiyah berkata, “Ini untuk engkau, dan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu melihat apakah hadiah itu akan diberikan kepadanya atau tidak? Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang membawa sesuatu kecuali pada hari Kiamat kelak ia akan memikulnya di atas pundaknya.” (HR Bukhari) Hadis ini sungguh luar biasa. Sean-

**TAULITIK**  
Tausiah Politik

Oleh: Prof Nasaruddin Umar  
(Menteri Agama/Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta)



dainya para penguasa dan pengusaha Muslim mengamalkan kandungan hadis tersebut, niscaya akan tercipta ketenteraman karena rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila praktik gulul me-

rajalela dalam kehidupan sosial, maka kekacauan dan ketidaktertenteraman pasti akan terjadi. Gulul bukan hanya berpotensi

◆ BERSAMBUNG KE HAL 6



# Aksi Noel Di Pengadilan Tipikor Jadi Perbincangan Hangat

Pernyataan Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang klaim punya info soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal "di-Noel-kan" mengundang perbincangan.

Ada yang menilai itu sebagai pengingat, tapi ada juga menilai Noel sedang cari perhatian.

Sebelumnya, Noel mewanti-wanti Menkeu Purbaya untuk "hati-hati." Hal tersebut disampaikan pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Noel hadir sebagai terdakwa kasus korupsi K3 di lingkungan Kemenaker.

"Hati-hati, Pak Purbaya, sejengkal lagi nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-Noel-kan. Hati-hati dong, Pak Purbaya," ungkap Noel.

Dia menyebut klaimnya berasal dari "informasi A1." Noel pun mengaku yakin informasi tersebut benar adanya dan bakal terjadi dalam waktu dekat.

Sementara itu, Purbaya menepis kemungkinan dirinya akan mengalami nasib serupa dengan Noel. Pasalnya, dia menegaskan tidak pernah menerima suap.

"Oh biar saja, yang penting saya enggak terima duit. Noel kan

terima (duit), kan saya enggak terima duit, gaji saya gede di sini (Menkeu), cukup. Kasus seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Juanda, Senin (26/1/2026).

Purbaya juga memastikan isu tersebut tidak akan mengganggu agenda reformasi pajak yang tengah dijalankan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya. Dia menegaskan, penerimaan uang atau suap justru akan menempatkannya dalam posisi rentan dan menghambat kinerja sebagai pejabat publik.

"Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden, yang lain saya enggak peduli," tandas Purbaya.

Menyoroti hak tersebut, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai, pernyataan Noel tersebut semata hanya untuk mendapatkan simpati publik sebagai penyelamat

"Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu ada teori *situational crisis communication* (SCCT) dari Timothy Combs, seseorang dalam krisis gunakan cara pulihkan kepercayaan publik," kata pria yang akrab disapa Hensa ini, Senin (2/2/2026).

Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan, jika langkah Noel sekadar mengingatkan Purbaya, sah-sah saja. Namun, lanjut dia, kalau Purbaya bersih, ya sulit bagi penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi.

"Nyanyian itu kan belum tentu benar," ujar Yudi kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (4/2/2026).

Untuk mengetahui pandangan dari Hendri Satrio dan Yudi Purnomo mengenai pernyataan Noel tentang Menkeu Purbaya akan di-Noel-kan, berikut wawancaranya.

## HENDRI SATRIO, Analis Komunikasi Politik Hanya Mencari-cari Simpati Dari Publik



Bagaimana Anda melihat pernyataan dari Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel soal Menteri Purbaya akan "di-Noel kan"?

Menurut saya, Noel lakukan dua hal. Pertama sebut partai K dan ormas, lalu ajak Purbaya media darling ikut kasusnya demi simpati publik saja supaya majelis hakim ini mengurangi hukumannya.

Jadi ada target lainnya?

Tentu hal tersebut demi menambah interaksi sosialnya sehingga publik melihat dan terus membicarakannya. Namun, cara tersebut justru tidak menguntungkan Noel.

Kenapa tidak menguntungkan Noel?

Ya karena eks Wamenaker terse-

## YUDI PURNOMO, Mantan Penyidik KPK Kalau Mengingatkan Tentu Sah-Sah Saja



Bagaimana pandangan Anda mengenai sikap mantan Menaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang mengingatkan Menkeu Purbaya agar lebih hati-hati dan mengklaim memiliki informasi bahwa Purbaya akan "di-Noel-kan". Bagaimana Anda melihat hal ini?

Ya, mengingatkan itu kan sah-sah saja.

Menurut Anda, apakah benar Purbaya sedang menjadi target oleh pihak tertentu agar dicari kesalahannya?

Kalau tidak ada kesalahan, tentu tidak akan ada laporan.

Apakah "nyanyian" Noel ini harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum?

Penegak hukum juga tidak bisa asal tangkap. Tentu harus ada perbuatan permulaan terlebih dahulu. Misalnya, apakah memang ada perintah, lalu kemudian ada uang yang terkirim,

dan hal itu terkait dengan jabatannya.

Jadi Anda melihat "nyanyian" Noel ini tidak benar?

Nyanyian itu kan belum tentu benar. Jadi, menurut saya tidak ada hal yang krusial terkait pernyataan Noel tersebut. Kalau Purbaya bersih, ya sulit bagi penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi.

Atau Noel sedang mencari panggung dan mencari perhatian dari pengadilan, atau bahkan Presiden Prabowo? Mengingat di awal ia juga berharap mendapatkan abolisi dari Presiden.

Saya tidak paham maksud pastinya, tetapi kita tahu Purbaya saat ini adalah *public darling*. Ketika ada apa pun yang menyebut nama beliau, pasti akan ikut menjadi pemberitaan. Buktinya, hal ini

akhirnya menjadi ramai dan memicu kontroversi hingga ditanyakan media langsung kepada Purbaya. Bahkan, Purbaya terlihat santai. Saat di-doorstop wartawan, beliau malah membedakan dirinya dengan Noel; bahwa beliau tidak menerima duit, sedangkan Noel terima. Karena seperti yang saya bilang tadi, penegak hukum tidak bisa ujug-ujug mengincarseseorang. Harus ada bukti permulaan. Jadi, sikap Purbaya sudah benar.

Sebagai mantan penyidik KPK, apa saran Anda kepada Purbaya agar tidak salah langkah?

Tetap kerja profesional, jangan menyalahgunakan wewenang, dan batasi pertemuan dengan orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan. Serta yang terpenting, jangan menerima uang yang tidak jelas sumbernya. ■ NNM

Rakyat Merdeka

THE POLITICAL NEWS LEADER

Terbit Sejak 22 April 1999

Direktur Utama:

Kiki Iswara Darmayana

Direktur:

Triphonia Istiariini, Maria Hanief, Ratna Susilowati

Dewan Kebijakan Redaksi:

Karim Paputungan, Supratman

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:

Riky Handayani

Wakil Pemimpin Redaksi:

Kartika Sari

Kepala Redaktur Eksekutif:

Muhammad Rusmadi, Wahyu Suryani, Sarif Hidayat

Pemimpin RM Digital:

Firsty Hestyarini

Redaktur Eksekutif:

Abdul Shomad, Aditya Nugroho, Anggowo Adi Septaningrat, Aulia Darwis, Daud Fadhillah, Esti Fitria Wulandari, Fiki Azis, Riffmi M, Ujang Sunda

Asisten Redaktur Eksekutif:

Bambang Trismawan, Dede Hermawan, Fazry, Marula Sardi, Oktavian Surya Dewangga, Romdony Setiawan, Siswanto, Widia Saputra

Reporter:

Ade Al Kautsar, Ahmad Latif Rosyidi, Alfrian Sidik, Bayu Prihartanto, Boy Sakti Hapsoro, Danu Arifinatto, Diananda Rahmasari, Didi Rustandi, Dwi Ilhami, Edy Burnama, Fajar El Pradianto, Faqih Mubarak, Haikal Amirullah, Hendrawan Kosim Wijaya, Irandi Kasmara, Irma Yulia, Kintan Pandujiati, Khoirul Umam, Merry Apriyani, Mentari Kusumawardhani, Nana Maulana, Nur Rochmanuddin, Novallianti, Ospi Darma, Paul Yoanda, Susilo Yekti

Wartawan Foto:

Sophan Wahyudi (Koordinator), Ali Futuhin (Wakil), Dwi Pambudo, Indra Hardi, Khairizal Anwar, M Qori Haliana, Ng Putu Wahyu Rama, Randy Tri Kurniawan, Rizky Syahputra, Tedy Octariawan Kroen, Wahyu Dwi Nugroho

Pracetak:

Fauzan Sojana (Koordinator)

Manager Keuangan:

Haris Indrawan, Manager Akunting: Dame Asnauli Gabena, Manager SDM: Mashuri, Legal Group: Wendi Darain

Tim Iklan:

Heru Dwiatmoko (Manager), Muanis (Wakil), Sofwan Tamami, Sandi Suwardi, Indra Firma, Muhtar Fauzi

Pemasaran:

Sultoni (Manager), Kusdiyono (Wakil)

SK Menpen RI No 326/SK/Menpen/SUPP/1998.

Dengan perubahan pada 6 April 1999 Surat Menpen/Dirjen PPG No 88/Dirjen PPG/KI/1999

Rakyat Merdeka - Sertifikat Dewan Pers, 9 Februari 2017

RM id - Sertifikat Dewan Pers, 31 Desember 2021

Alamat: Gedung Graha Pena, Lantai 8, Jl Kebayoran Lama No 12, Jakarta Selatan 12210

Percetakan: PT. Wahana Semesta Intermedia, Jl Jampang No. 99A Bekasi. Telp 0811071633

Telp: 021-53699507, Hotline Pemasaran: 021-53699507, Jalur WhatsApp: Redaksi 081298336822 (Si Nurganingsih), Iklan 08131555825 (Muanis), 0816121764 (Heru), Layanan Pelanggan 081299666375 (Toni)

Harga Iklan: 99.000/mmk (FC), 85.000/mmk (BW). Harga Langganan Koran: Rp200.000/ bulan (Belum termasuk ongkos kirim)

Rekening Bank BCA KCP Palmerah 229.300.8515 an PT Wahana Ekonomi Semesta



## Soal Kendala Syarat Agunan Legislator Ingin UMKM Dipermudah Dapat KUR



**Rycko Menoza**

ANGGOTA Komisi VII DPR Rycko Menoza mendorong agar persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 100 juta dipermudah karena masih memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Terutama, persyaratan agunan atau jaminan.

Rycko sebelumnya menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian UMKM, khususnya keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta terpenuhinya sejumlah indikator kinerja. Namun, capaian administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan.

Keluhan tersebut, kata politisi Fraksi Golkar ini, ditemukan di daerah pemilihannya, Lampung I. Banyak pelaku UMKM mengaku kesulitan mengakses KUR karena masih dibebani persyaratan jaminan yang tidak mudah dipenuhi.

“Saya kira ini menjadi salah satu penekanan penting dalam hasil rapat kerja sore hari ini. Saya secara khusus menekankan agar leading sector yang terkait benar-benar bisa dikedepankan,” ujar Rycko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dengan praktik di lapangan harus segera dievaluasi. Pengawasan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pembiayaan

UMKM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rycko menegaskan, persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Perlu sinergi yang lebih kuat antara Kementerian UMKM dengan kementerian lain yang berada dalam lingkup Komisi VII DPR, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. “Saya kira tidak mungkin di tempat destinasi wisata tidak ada UMKM-nya. Ini kan saling berkaitan. Di dalamnya juga ada ekonomi kreatif,” katanya.

Rycko menilai, pengembangan destinasi wisata nasional harus berjalan seiring dengan penguatan UMKM lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, hingga produk kreatif.

Selain itu, Rycko menyoroti pentingnya peningkatan kualitas produk UMKM. Ia berharap Kementerian UMKM tidak hanya mengejar peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memastikan produk UMKM memiliki standar mutu yang jelas.

Menurutnya, sertifikasi halal, izin edar, serta kualitas kemasan menjadi faktor penting agar produk UMKM mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. “Harapan saya, pelaku UMKM tidak hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas, termasuk standarisasi sertifikasi halal dan kemasan,” tegas Rycko.

Mantan Bupati Lampung Selatan itu juga menekankan pentingnya konsistensi program Kementerian UMKM, khususnya di awal tahun 2026. Diharapkan seluruh kebijakan yang telah dirancang benar-benar dijalankan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. “Kementerian UMKM di awal tahun ini perlu konsisten. Konsisten terhadap kepentingan masyarakat dan tujuan utama pemberdayaan UMKM,” ujarnya. ■ **PYB**

## Jelang Ramadhan Komisi IV Harap Nelayan Dapat Bantuan Khusus

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pemerintah memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan itu khususnya kepada nelayan kecil serta masyarakat korban bencana menjelang Ramadan 2026.

Permintaan itu disampaikan Alex saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Alex mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan “hadiah lebaran” kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS).

“Output dari kebijakan VMS ini adalah Penerimanan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita,” ungkap Alex, Rabu (4/2/2026). Politisi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal berizin pusat, umumnya kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem ini berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara *real-time*, meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.

Hingga April 2025, tercatat sekitar 8.893 kapal telah ter-

pasang VMS dari total 13.313 unit kapal yang mengantongi izin pemerintah pusat. Alex pun mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VMS.

“Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS, tentunya akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap,” ungkap Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat (Sumbar).

Alex juga menyoroti kebijakan pangan, khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026. Ditegaskan, GPM harus mendukung keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana, terutama bencana hidrometeorologi di wilayah Sumbar, Sumut, dan Aceh.

“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. To-longlah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” tegas Alex.

Pernyataan tersebut disampaikan Alex merespons rencana ID Food menggelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia guna mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, GPM hanya akan digelar di dua titik di Aceh, empat titik di Sumut, dan sembilan titik di Sumbar. ■ **BYU**

# PARLIAMENT UPDATE



**RAKER MENKEU & DPR:** Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) berjabat tangan dengan Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto sebelum mengikuti rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Raker membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

TEDY KROENIRAKYAT MERDEKA/RM.ID

## Tumpukan Sampah Di Bali Ganggu Pariwisata Komisi VII: Percepat Program Olah Sampah Jadi Energi

**Senayan menyoroti masalah sampah di Bali yang sempit disinggung Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengatasinya, perlu langkah yang cepat serta terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

ANGGOTA Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, persoalan sampah di Bali sudah lama terjadi. Kini persoalan itu berkembang jadi masalah serius yang tak cuma mengganggu dalam aspek pariwisata, tapi juga menyentuh aspek lingkungan dan citra nasional.

Tumpukan sampah yang tidak tertangani secara sistematis mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya kebijakan pengelolaan limbah. “Situasi itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan Pemda,” ujar Saleh dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Pemerintah, lanjutnya, telah memiliki program pengolahan sampah menjadi energi melalui skema *waste to energy* yang dirancang sebagai solusi jangka panjang. Program itu direncanakan dibangun di puluhan kota sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan limbah. Untuk tahun ini, akan dibangun di 34 kota.

Posisi Bali sebagai destinasi

utama pariwisata nasional, sambunginya, membuat daerah itu layak mendapat prioritas khusus. Tanpa percepatan program, persoalan sampah akan terus berulang dan menggerus daya saing pariwisata. Untuk itu, harus ada koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyusun rencana penanganan sampah yang terukur.

“Pendekatan parsial dan sektoral tidak lagi relevan menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks. Kemenpar dan Pemprov Bali perlu duduk bersama membuat rencana utama dan prioritas,” jelasnya.

Menurutnya, program nasional juga perlu diperkuat dengan berbagai inisiatif pendukung seperti bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), dan pengolahan berbasis komunitas. Pendekatan itu dianggap bisa memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

“Saya dengar ada juga Gerakan Indonesia Asri, Optimal-



**Saleh Partaonan Daulay**

isasi Bank Sampah, TPS3R, dan rumah Maggot,” ujar legislator Fraksi PAN itu.

Dia menegaskan, penanganan sampah tidak boleh terus ditunda dengan alasan administratif atau teknis. Pemerintah Pusat dan Daerah harus bergerak cepat serta konsisten dalam mengeksekusi kebijakan, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak memberi nilai positif bagi siapa pun.

Dalam konteks pengawasan, Saleh menyatakan, Komisi VII DPR akan mengawal pelaksanaan program persampahan. DPR juga siap terlibat jika dibutuhkan regulasi tambahan untuk memperkuat kebijakan lingkungan. “Suatu negara dikatakan maju

jika negara itu bersih. Karena itu kebersihan adalah ciri utama negara maju,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi VII DPR Samuel JD Wattimena menegaskan, persoalan kebersihan bukan hanya tanggung jawab Kemenpar, tapi melibatkan banyak kementerian dan Pemda. Namun, Kemenpar dinilai tetap harus aktif memantau pelaksanaan program di lapangan, dan tidak hanya menyampaikan imbauan.

Politikus PDIP itu menilai, kritik Presiden terhadap kondisi destinasi wisata harus dijadikan momentum pembenahan menyeluruh. Pendekatan reaktif tidak cukup untuk menciptakan perubahan jangka panjang. “Jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Yang dibutuhkan itu pemantauan rutin dan evaluasi,” ujarnya.

Samuel juga menyoroti dampak persoalan sampah terhadap minat kunjungan wisatawan. Kebersihan destinasi berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata nasional. Jika pantainya kotor, lingkungannya tidak terjaga, tentu saja akan jadi catatan buruk. Komisinya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pariwisata. “Pengelolaan kebersihan ha-

rus menjadi bagian utama pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi juga tertata dan nyaman,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Menteri Investasi terkait proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Groundbreaking proyek itu dijadwalkan Maret 2026 dengan waktu pekerjaan paling lama 12 bulan dan 2027 siap beroperasi.

Koster meyakini, beroperasi PSEL akan mempercepat penanganan sampah, terutama di Badung dan Denpasar. Teknologi itu akan diperkuat dengan komposter dan sistem pengolahan modern lainnya. “Pak Presiden sangat concern terhadap Bali karena destinasi utama. Beliau menginginkan supaya kita bergerak lebih cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengur jajaran Pemda Bali terkait persoalan sampah. Persoalan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret. “Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama pusat dan daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu,” tandasnya. ■ **PYB**

GFC Capai Rp 992 Triliun

## DPR: Jejaring Tambang Makin Berkembang

ANGGOTA Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menilai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait tindak pidana kejahatan keuangan berbasis lingkungan, khususnya di sektor pertambangan emas. Kejahatan lingkungan dinilai telah berkembang menjadi sebuah kejahatan keuangan berskala besar.

“Perputaran uang di pertambangan emas ilegal mencapai Rp 992 triliun. Ini uang besar dan ada kekuatan besar di belakangnya ini,” ujar Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Diketahui, PPATK menemukan tindak pidana kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) pada 2025 mencapai Rp 992 triliun. Kejahatan lingkungan yang dimaksud termasuk dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia seperti, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.

Namun, dia memandang temuan ini belum berdampak signifikan pada pemulihan lingkungan di Indonesia. Sehingga PPATK perlu berkoordinasi

Sudding melanjutkan, akhir-akhir ini beberapa perusahaan tambang dicabut izinnya oleh Pemerintah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kejahatan di sektor pertambangan dan perkebunan. Termasuk masalah distribusi emas ilegal lintas wilayah hingga ke pasar luar negeri. “Ini menandakan adanya jejaring internasional yang memang sulit disentuh,” kata politikus PAN ini.

Menurut Sudding, kejahatan semacam ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pencucian uang dan penghindaran terhadap pajak. Sehingga lembaga penegak hukum harus membuka ke masyarakat siapa saja pemain di belakang perusahaan tambang ilegal itu.

“Sejauh mana keterlibatan korporasi dan aktor lintas negara dalam rantai keuangan terkait masalah pertambangan emas tanpa izin,” kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.

Namun, dia memandang temuan ini belum berdampak signifikan pada pemulihan lingkungan di Indonesia. Sehingga PPATK perlu berkoordinasi



**Sarifuddin Sudding**

dengan aparat penegak hukum guna mengusut tuntas seluruh tambang ilegal yang ada di seluruh Indonesia.

Senada, anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menyoroti perputaran dana di pertambangan ilegal yang kian meningkat tajam. Awalnya berada di kisaran Rp 339 triliun kini melonjak tajam hingga menembus Rp 992 triliun.

Lonjakan perputaran dana tersebut menunjukkan aktivitas tambang ilegal di beberapa daerah di Indonesia membesar dan

terorganisasi. “Jadi bukan hilang tapi malah makin tambah. Ini menunjukkan jejaringnya hidup dan berkembang,” kata Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hinca menyebut, setidaknya terdapat uang sebesar Rp 185 triliun yang teridentifikasi langsung dalam satu jejaring transaksi, dengan aliran dana yang masuk ke rekening pemain besar. Bahkan sebagian dana tersebut mengalir lintas pulau dan terhubung ke pusat pengolahan serta perdagangan emas di Jawa dan kota-kota besar. “Sebelum akhirnya bergerak ke luar negeri melalui mekanisme ekspor,” ungkap politikus Demokrat ini.

Selain itu, Hinca menyoroti paradoks sektor emas nasional. Di mana Indonesia masuk jajaran 10 besar produsen emas dunia dengan cadangan sekitar 3.600 metrik ton. Tapi produksi emas domestik justru fluktuatif dan cenderung menurun. “Pada 2023, produksi nasional hanya sekitar 83 ton, turun dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Terlebih PT Antam yang se-

lama ini dianggap sebagai pemain utama, ternyata hanya mampu memproduksi sekitar 1 ton emas dari tambang sendiri per tahun, sementara penjualan logam mulia mencapai 43–44 ton. “Artinya, lebih dari 90 persen emas yang dijual berasal dari pembelian pihak lain. Di sinilah intelijen keuangan menjadi sangat penting untuk melihat asal-usul emas itu,” kata Hinca menekankan.

Hinca bilang, hal itu menunjukkan aktivitas tambang emas ilegal telah membentuk ekosistem bayangan yang nyaris lengkap. Mulai dari wilayah konsesi, logistik, penadah, *smelter*, jalur ekspor, hingga rekening perbankan.

Sementara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan temuan transaksi di tambang ilegal termasuk emas mencapai Rp 992 triliun. Hingga kini, temuan tersebut dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian. “Kerja sama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas,” ucap Ivan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026). ■ **TIF**

BUKU BARU

**Judul Buku** : Menembus Batas: Revitalisasi Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan Indonesia

**Penulis** : Prof. Adies Kadir

**Penerbit** : RMBooks

**Halaman** : 315 Halaman

**Harga** : Rp75.000,-

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini membuka ruang baru tentang bagaimana Komisi Yudisial seharusnya ditempatkan dalam arsitektur ketatanegaraan modern. Bisa menjadi rujukan penting bagi reformasi peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

BUKU BARU

**Judul Buku** : Paizi

**Harga** : Rp75.000,-

BUKU BARU

**Judul Buku** : Menuju Politik Hukum Baru

**Harga** : Rp75.000,-

BUKU BARU

**Judul Buku** : JokowiNOMIC

**Harga** : Rp80.000,-

BUKU BARU

**Judul Buku** : Rumah Aspirasi Fungsional Wakil Rakyat

**Harga** : Rp75.000,-

BUKU BARU

**Judul Buku** : Good Political Party Governance

**Harga** : Rp75.000,-

BUKU BARU

**Judul Buku** : Catatan Seorang Jubir

**Harga** : Rp115.000,-

BUKU BARU

**Judul Buku** : TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA

**Harga** : Rp85.000,-

Dapatkan di GRAMEDIA, rmbooks.id, dan toko online lainnya | Head Office: Gedung Graha Pena Lt. 8, Jl. Kebayoran Lama No. 12 Jakarta Selatan | Informasi Pemesanan Buku Hubungi: 0857 7918 9431







## Dorong Maskulinitas Positif Anak Laki-laki Harus Berani Ekspresikan Emosi Dan Empati

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong penguatan konsep maskulinitas positif yang sehat. Anak dan remaja laki-laki didorong berani mengekspresikan emosi, menunjukkan empati, serta mencari bantuan ketika menghadapi tekanan psikologis.

“Selama ini penguatan psikologis kerap lebih difokuskan kepada anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki sering dipersepsikan sebagai pihak yang selalu kuat dan tidak boleh menunjukkan kerentanan,” ujar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sepanjang 2025 tercatat lebih dari 6 ribu anak laki-laki menjadi korban kekerasan berbasis gender. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 juga mencatat, prevalensi kekerasan seksual terhadap anak laki-laki mencapai sekitar 8,34 persen, hampir sebanding dengan anak perempuan.

Data tersebut menunjukkan anak laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan di berbagai lingkungan. Mulai dari keluarga, sekolah hingga komunitas. Namun, kuatnya stereotipe maskulinitas membuat banyak anak laki-laki memilih diam, enggan melapor dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Kondisi ini berpotensi berdampak pada kesehatan mental sekaligus melanggengkan siklus kekerasan.

Arifatul menilai, stigma maskulinitas yang menuntut laki-laki untuk selalu mandiri dan menahan emosi justru membebani anak laki-laki. Akibatnya, banyak persoalan pribadi dipendam sendiri dan

## Kemendiktisaintek–BRIN Sinergikan Ekosistem Riset Secara Nasional

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperkuat kolaborasi strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengintegrasikan ekosistem riset nasional melalui dukungan pendanaan hingga Rp 8 triliun.

Sinergi ini diarahkan untuk mempercepat hilirisasi riset, sekaligus memastikan puluhan ribu proposal riset akademik terfasilitasi secara optimal.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara Kemdiktisaintek dan BRIN di Graha Widya Bhakti, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJ Habibie BRIN, Rabu (4/2/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto menegaskan, kolaborasi dengan BRIN merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul serta peningkatan daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penandatanganan MoU ini menjadi momentum memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin erat antara perguruan tinggi di Indonesia dan lembaga-lembaga riset.

“Saya yakin, kolaborasi ini akan memperkuat langkah kita menghadapi tantangan ke depan. Termasuk, upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan belajar dari pengalaman negara lain, seperti Jepang,” ucap Brian.

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menekankan kolaborasi merupakan kunci utama.

“Melalui sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan, riset dan inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional,” katanya.

Dalam kesempatan yang

berisiko memengaruhi kesehatan mental serta perilaku sosial remaja.

“Tidak seharusnya ada pemisahan peran yang kaku antara anak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab setara dalam masyarakat, serta berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan dan ruang dialog yang aman,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu juga menyoroti peran strategis sekolah sebagai lingkungan yang mampu mendeteksi dan mencegah permasalahan sejak dini. Sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman dan inklusif, tempat siswa dapat menyampaikan keresahan tanpa rasa takut dihakimi.

Untuk itu, diperlukan penguatan peran guru, khususnya guru Bimbingan dan Konseling (BK), dalam mendampingi siswa yang mengalami tekanan psikologis.

Dalam kesempatan tersebut, Arifatul menyampaikan apresiasi kepada *Ending Child Prostitution and Trafficking* (ECPAT) Indonesia, khususnya *Youth Group* ECPAT Indonesia, atas inisiatif menghadirkan program *Boys Initiative: Breaking the Silence*.

Program ini sejalan dengan mandat KemenPPPA dalam memperkuat perlindungan anak, mendorong maskulinitas positif, serta membangun ruang aman bagi anak dan remaja, khususnya anak laki-laki.

Para pelajar diharapkan saling peduli dan peka terhadap perubahan perilaku teman di lingkungan sekolah.

“Saya berharap kegiatan ini dapat direplikasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang sehat secara mental, setara dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” jelas Arifatul. ■ ASI

## Kemendiktisaintek–BRIN Sinergikan Ekosistem Riset Secara Nasional

sama, juga diselenggarakan Nobel Laureate Lecture dengan menghadirkan ilmuwan terkemuka asal Jepang, peraih Nobel Kimia 2025, Prof. Susumu Kitagawa.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan ekosistem riset nasional yang terhubung dengan jejaring riset global.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, Nobel Laureate Lecture menjadi ruang penting untuk menjembatani sains fundamental dengan kebutuhan pembangunan.

Penelitian Prof. Kitagawa di bidang *Metal-Organic Framework* (MOF) memiliki relevansi strategis bagi Indonesia. Terutama dalam mendukung ketahanan energi, pengelolaan lingkungan dan pengembangan teknologi berkelanjutan melalui kolaborasi riset internasional.

Teknologi MOF membuka peluang pemanfaatan dalam penyimpanan dan pemisahan gas, pengolahan air, hingga aplikasi energi bersih. Termasuk pengembangan *Compressed Natural Gas Storage* (CNG).

Inovasi ini sejalan dengan upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor serta mendorong pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih ramah lingkungan.

Dukungan terhadap penguatan kolaborasi riset ini juga disampaikan Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru.

Dia menegaskan, kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang sains, teknologi dan pendidikan tinggi terus berkembang dan menjadi fondasi penting dalam penguatan kapasitas riset serta pengembangan sumber daya manusia di kedua negara. ■ ASI



**SWAFOTO:** Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) melayani sejumlah kepala desa berswafoto, usai peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (4/2/2026). Pemerintah Sulteng merampungkan pembentukan Posbankum di 2.017 desa dan kelurahan yang diharapkan dapat mempermudah akses keadilan dan memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

ANTARA FOTO/BASRI MARZUKIBAR

## 2.017 Posbankum Hadir Di Sulteng Negara Perluas Akses Keadilan Hingga Desa

**Pemerintah memperluas akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput dengan meresmikan 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kehadiran Posbankum ini diharapkan menjadi fondasi penguatan budaya sadar hukum, sekaligus pencegahan konflik sosial sejak dini.**

KEHADIRAN Posbankum di desa dan kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas akses terhadap keadilan. Selain itu, menjadi instrumen penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mencegah konflik sosial sejak dini.

“Negara tidak boleh absen ketika masyarakat membutuhkan perlindungan hukum,” ujar Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat meresmikan 2.017 Posbankum Desa/Kelurahan di Provinsi Sulteng, Rabu (4/2/2026).

Politisi Partai Gerindra itu

menjelaskan, keberhasilan menghadirkan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Sulteng merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Seluruh pihak memiliki semangat yang sama untuk memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau, gratis dan berkeadilan.

Diharapkan, Posbankum dapat dimanfaatkan optimal oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum yang adil, cepat dan humanis.

Selain itu, program pelayanan hukum gratis ini diharapkan mampu memperkuat peran

Pemerintah desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat lokal.

“Keadilan itu wajib dan harus kita beri akses kepada seluruh masyarakat. Terutama kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan,” katanya.

Supratman mengingatkan kepada para kepala desa dan lurah pentingnya peran mereka sebagai juru damai dalam penanganan perkara pidana maupun perdata melalui pendekatan *Restorative Justice* (RJ).

Dia menegaskan, penerapan RJ harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang baru.

“Perlu diingat, *Restorative Justice* dalam KUHPA hanya berlaku satu kali untuk perkara yang sama. Jika pelaku mengulangi perbuatannya, maka pendekatan RJ tidak dapat diterapkan kembali,” tegasnya.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengapresiasi komitmen

Kemenkum bersama seluruh pemangku kepentingan menghadirkan layanan hukum hingga ke tingkat paling bawah.

“Pemerintah Sulteng mendukung penuh Posbankum sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berintegritas dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Anwar menilai, Posbankum merupakan investasi sosial jangka panjang bagi terciptanya ketertiban dan keadilan di Sulteng. Terlebih, dalam implementasinya, kepala desa berperan sebagai juru damai sekaligus paralegal di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menambahkan, dengan diresmikannya 2.017 Posbankum, seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah kini telah memiliki Posbankum atau mencapai 100 persen cakupan.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah desa dan kelurahan. Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

“Posbankum tidak boleh berhenti sebagai simbol pencapaian, tetapi harus benar-benar berfungsi sebagai ruang yang ramah, inklusif dan solutif bagi masyarakat,” ujar Rakhmat.

Menurutnya, kehadiran Posbankum sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum.

Karena itu, Kemenkum terus mendorong penguatan layanan hukum yang mudah diakses, inklusif dan berkeadilan melalui program Posbankum Desa dan Kelurahan. ■ SSL

Ditegaskan Menteri PKP

## Rusun Subsidi Jadi Fondasi Ekonomi Dan Ketahanan Nasional

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, sektor perumahan kini menjadi fondasi ekonomi dan ketahanan nasional. Rumah susun (rusun) subsidi dan skema pembiayaan baru terus didorong agar ekonomi tumbuh berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Ara-sapaan Maruarar Sirait mengatakan, sektor perumahan memiliki peran sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup, serta daya saing bangsa Indonesia. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat diyakini akan menciptakan stabilitas sosial yang jauh lebih kokoh ke depannya.

“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup dan keadilan sosial,” ujarnya di acara Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Tahun ini, Kementerian PKP memprioritaskan pembangunan rusun subsidi sebagai solusi efektif atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan dan industri. Langkah nyata tersebut diambil guna menjawab tingginya kebutuhan hunian, sekaligus menekan biaya hidup masyarakat pekerja di pusat ekonomi.

“Program prioritas Kementerian PKP adalah rusun subsidi dan saat ini mulai dilaksanakan,” ucapnya.

Pemerintah menjamin lahan yang digunakan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, telah berstatus *clean and clear* secara hukum untuk proses pembangunan. Koordinasi in-ber daya manusia di kedua Komisi Pemberantasan Korupsi



DOK PKP

**BERBINCANG:** Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) berbincang dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, usai menjadi pembicara Nusantara Economic Outlook 2026 yang mengusung tema “Enhancing National Resilience, Sustainable Growth” di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Forum ini membahas penguatan ketahanan nasional dan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui sinergi kebijakan lintas sektor.

(KPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk memastikan transparansi.

Pembangunan rusun subsidi di Meikarta dirancang sebagai model hunian vertikal terintegrasi yang mampu mendekatkan tempat tinggal dengan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Rusun subsidi ini tidak hanya menjawab persoalan hunian, tetapi mendukung produktivitas kerja,” tambahnya.

Terkait aspek pembiayaan,

Pemerintah resmi menghadirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang menjadi tonggak sejarah baru sejak Indonesia merdeka. Kebijakan ini menyediakan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp 130 triliun yang dikhususkan bagi akses perumahan rakyat berpenghasilan rendah.

“Belum pernah ada KUR perumahan sepanjang ada Indonesia, dari Merdeka sampai sekarang,” tutur Ara.

Terobosan yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memberikan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan

formal.

Program ini sekaligus meminimalisir ketergantungan warga terhadap pinjaman berbunga tinggi yang sangat membebani beban finansial rumah tangga.

“Itulah langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” kata dia.

Tenaga Ahli Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Pahala Nainggolan mengatakan, Pemerintah tengah memfinalisasi regulasi baru mengenai harga jual unit rusun subsidi.

Berdasarkan rencana tersebut, kisaran harga unit rusun subsidi nantinya akan ditetapkan mulai

pada angka Rp 350 jutaan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, harga jual yang berlaku saat ini dinilai oleh pengembang sudah tidak memadai. Penyesuaian harga di masa depan akan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi yang berlaku di setiap wilayah agar tetap kompetitif.

BP Tapera, mencatat penyailuran rusun subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga saat ini masih menghadapi tantangan serapan yang rendah. Kendala utama terletak pada pola pikir Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang secara umum masih merasa enggan berpindah ke hunian vertikal.

Selain faktor persepsi masyarakat, biaya pengelolaan tambahan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) juga menjadi perhatian serius Pemerintah dalam pengkajian harga.

Pemerintah berkomitmen menekan komponen biaya tersebut agar tidak menjadi beban tambahan yang menyulitkan bagi warga yang menghuni unit rusun.

“Besaran IPL perlu ditekan agar tidak menjadi beban bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” lanjutnya.

Proyek strategis di Meikarta diproyeksikan mencakup pembangunan 18 tower rusun subsidi yang menyediakan total sekitar 141.000 unit hunian layak bagi masyarakat.

Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 39 triliun ini ditargetkan mulai melakukan pemancangan tiang pertama pada Maret 2026. ■ JAR



# Optimisme Yang Keliru

... DARI HALAMAN 1

Atau, “saya dekat dengan penguasa, enggak mungkin ditangkap”.

Ini tragis, tapi nyata. Karena, pola pikir atau optimisme yang salah ini akan menormalisasi pelanggaran kecil yang lama-lama jadi besar dan meluas.

Lebih parah lagi kalau ilusi kebal risiko ini berkembang di kalangan pejabat tinggi negara. Karena, di situlah terjadinya “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Ada peniruan. Ada pemupukan. Di seluruh Indonesia. Sampai ke pelosok. Sampai ke Dana Desa.

Di sinilah tantangannya. Optimisme semu dan keliru ini harus diruntuhkan. Pihak berwenang pasti sudah tahu caranya. Tinggal eksekusi dan dijalankan.

Meruntuhkan optimisme semu tentu saja hanya sebagian kecil. Masih banyak upaya lain yang perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Bukan hanya insidental atau menjadi “pemadam kebakaran”.

Perasaan tak tersentuh ini bisa dirun-

# Tersihir View Pegunungan

... DARI HALAMAN 1

alamnya yang sangat indah. Dan saya sangat senang sekaligus bersyukur, saat mimpi indah ini akhirnya menjadi kenyataan. *My dream came true.*

Selasa pagi, 26 Januari 2026 sekitar pukul 7:00, pesawat Swiss Air yang saya tumpangi bersama jurnalis *Kompas* Harry Susilo dan jurnalis *Have-HalalWillTravel.com* dari Singapura Nur Khalidah Binte Kamsani (Khal), mendarat mulus di Bandara Zurich yang juga dikenal dengan nama Bandara Kloten. Kami disambut oleh Ferani Heng, Market Representative-Switzerland Tourism Indonesia dan Chatchadaporn Chuichan (Pookie), jurnalis dari Majalah *GQ* Thailand, yang sudah tiba sehari sebelumnya. Suhu udara pagi itu menunjukkan 0 derajat Celcius. Dinginnya suhu udara Zurich pagi itu, terasa menusuk kulit.

Setelah mandi dan sarapan di *Business Lounge* di area kedatangan Bandara Zurich, kami langsung meluncur ke Stasiun kereta bawah tanah dan dipandu Ferani Heng sebagai *tour leader*. Di stasiun, kami disambut Lea Steiner, Media & Trade Marketing Travel Switzerland. Lalu kami diajak naik kereta dari Stasiun Zurich HB Bern Thun Spiez menuju Interlaken selama sekitar dua jam. Setelah itu, kami transit dan lanjut naik kereta menuju Grindelwald selama sekitar 45 menit. Keretanya bagus, bersih, dan modern.

Dari balik jendela kereta, kami seperti tersihir oleh *view* pegunungan dan pedesaan yang *breathtaking*. Deretan pohon, suasana pedesaan yang tenang dan asri, serta hamparan pegunungan yang diselimuti salju, bikin mata tak berkedip sekaligus menenangkan.

Selama perjalanan, Steiner menjelaskan tentang sistem jaringan kereta api, salah satu moda transportasi favorit publik Swiss dan para *traveller* dari berbagai dunia. Jaringan dan rute keretanya membentang ke banyak wilayah, menghubungkan kota di dataran rendah hingga kawasan bukit dan pegunungan yang indah yang berbatasan dengan Italia, Jerman dan Prancis. Rute yang dilalui kereta yang kami tumpangi, terkadang menaikjak, berbelok meliuk tajam, dengan panorama yang sangat cantik dan mengundang decak kagum.

Menurut Steiner, ada lima alasan mengapa Swiss menjadi negara yang sangat populer dan wajib untuk dikunjungi. Pertama, *the view*. Swiss yang dikelilingi pegunungan Alpen yang mendunia itu, menawarkan pemandangan alam yang sangat cantik dan epik.

Kedua, *the ticket*. Menurut Steiner, hanya dengan satu *travel pass* alias tiket terusan, warga Swiss maupun turis bisa menggunakan pass tersebut untuk transportasi publik yang dikelola Pemerintah. “Hanya dengan menggunakan travel pass ini, kita bisa terhubung dengan transportasi publik baik

## Penggelapan (Gulul)

... DARI HALAMAN 1

melahirkan kekacauan dan kegelisahan sosial, tetapi juga menimbulkan kegundahan batin. Harta benda, kekayaan, bahkan jabatan yang diperoleh melalui cara gulul tidak akan membawa keberkahan. Bebannya bukan hanya ditanggung selama hidup di dunia, tetapi juga kelak di akhirat.

Saat ini, membedakan antara gulul, hadiah, dan komisi menjadi semakin sulit. Hadiah dan komisi pada dasarnya bisa bersifat halal dan terpuji. Namun, apabila hadiah—terutama komisi—telah mengarah pada ketidakjujuran,

tuhkan misalnya dengan menghadirkan risiko yang terasa dekat, personal, dan tak terlelakkan.

Misalnya, tidak sekadar dengan melontarkan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Itu terkesan abstrak. Jauh. Langsung saja, “bulan depan, BPK akan melakukan audit dan mencocokkan dokumen X dan Y”. Itu jelas. Terasa dekat, sehingga ada perasaan “kita bisa kena”.

Atau, menampilkan testimoni personal. Bukan sekadar ceramah atau slogan. Misalnya, ada mantan pejabat menceritakan sendiri: “Saya pikir tadinya aman karena dekat kepala daerah. Ternyata nama saya disebut oleh staf saya sendiri.” Ini konkret. Terasa dekat. Lebih mengena.

Atau, bisa juga menekankan faktor waktu. “Hari ini mungkin aman. Tahun depan bisa jadi tidak.” Karena, banyak kasus terbuka setelah pergantian kekuasaan, bukan saat pelaku masih kuat. Ini sudah banyak buktinya. Bahkan, dalam waktu dekat, bisa saja itu terjadi. ■

bus, kereta atau ferry. Sangat mudah dan simpel,” jelasnya.

Ketiga, *the reach*. Untuk berkeliling kota, wilayah pegunungan atau pedesaan di negeri penghasil cokelat yang super *yummy* itu, mudah dijangkau oleh sistem transportasi publik yang terkoneksi dengan baik. Yaitu kereta, bus, ferry maupun *cable car* atau gondola yang menembus area pegunungan yang menjulang tinggi dan tebing yang terjal.

Sedangkan keempat, *the reliability*. Swiss menjadi negara yang sangat handal dalam memudahkan dan bikin para traveler nyaman, aman plus *happy*. Terakhir, *the sustainability*. Negerinya petenis dunia Roger Federer itu, sangat mendukung program sustainability (keberlanjutan) dan *clean energy* (energi bersih) di tengah isu krisis *climate change* dan *global warming* yang dihadapi dunia.

Ferani Heng menambahkan, hampir seluruh transportasi publik di Swiss, sudah memanfaatkan bahan bakar yang ramah lingkungan alias *clean energy*. “Contohnya kereta yang sedang kita tumpangi sekarang, ditempel label bertuliskan ‘Swissustainable Leading’. Itu artinya, kereta ini sudah mendapat predikat level tertinggi dalam penerapan *sustainability* program karena mereka menggunakan *renewable energy* atau bahan bakar ramah lingkungan yang sumbernya energi bersih,” jelas Ferani, sambil menunjuk ke arah label bertuliskan “Swisstainable Leading” yang ditempel di dinding kereta.

Dia menambahkan, sejak tahun 2025, semua kereta di Swiss sudah menggunakan *renewable energy*. Tak hanya industri transportasi, semua perusahaan yang bergerak di sektor lainnya di Swiss, juga berlomba-lomba untuk mendapatkan label ‘Swisstainable Leading’ lewat renewable energy,dan mendaur ulang (*no waste*) semua produk yang digunakan sehari-hari.

Yang menarik, selain memiliki restoran yang menjual aneka minuman dan makanan, dan toilet, kereta ini juga dilengkapi gerbong khusus untuk keluarga (family room). Steiner mengajak kami untukampir ke family room. Ruangannya dilengkapi fasilitas bermain anak-anak seperti perosotan, meja bermain dan boneka warna warni. Tampak ada dua anak sedang asyik bermain perosotan, sambil disaksikan oleh orangtuanya.

Tak terasa, setelah menempuh perjalanan kereta api hampir tiga jam dengan dua kali ganti kereta, akhirnya kami tiba di Grindelwald. Grindelwald adalah desa pegunungan yang indah di Pegunungan Alpen Bernese Swiss (distrik Interlaken-Oberhasli), yang menjadi pintu gerbang utama untuk wilayah Jungfrau. Terletak di kaki lereng utara Eiger yang sangat terkenal dan populer, desa ini menawarkan atraksi utama seperti *First CliffWalk*, *Jungfraujoeh* (Puncak Eropa), dan *Gletscherschlucht* (Ngarai Gletser). (*Bersambung*)

terlebih lagi kecurangan, maka hal itu jelas merusak tatanan normatif dan moral masyarakat. Memberikan hadiah kepada seseorang atas prestasi yang diraihny adalah hal yang wajar dan dibenarkan. Akan tetapi, jika pemberian tersebut dikaitkan dengan target tertentu—misalnya peserta tender memberikan hadiah kepada panitia lelang—maka patut diduga sebagai gulul atau risywah (suap).

Demikian pula komisi yang diberikan dengan pamrih tertentu patut dicurigai sebagai bagian dari praktik gulul. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, istilah “komisi” kini cenderung berkonotasi negatif. ■

# TO THE POINT

# Perlu Jaga Momentum Setelah Lebaran

## Pertumbuhan Ekonomi

... DARI HALAMAN 1

ma Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan bantuan sosial pangan selama dua bulan, termasuk bantuan minyak goreng. Cakupan penerima diperluas dari sebelumnya desil 2 menjadi desil 4. Jika pada 2025 bantuan menjangkau sekitar 18 juta orang, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 35 juta orang. “Ini membantu menekan inflasi karena masyarakat sudah mendapatkan kebutuhan pokok,” kata Airlangga Hartarto.

Selain bansos, pemerintah memberikan potongan biaya transportasi untuk mendukung mobilitas dan kelancaran mudik Lebaran. Diskon angkutan laut dan kereta api mencapai 30 persen, jalan tol sekitar 20 persen, serta tiket pesawat hingga 17 persen.

Insentif fiskal lainnya juga tetap berjalan. Antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan bebas pajak penghasilan PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan. Tahun lalu, nilai insentif tersebut mencapai sekitar Rp 31 triliun. Airlangga menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan selama satu kuartal diperkirakan melibatkan sekitar Rp 80 triliun dan berkontribusi langsung pada pergerakan ekonomi lapisan bawah.

“Tiga bulan pertama kita fokus mendorong ekonomi rakyat. Kalau ekonomi rakyat tumbuh, ekonomi menengah dan atas akan ikut terdorong,” ujarnya.

Ke depan, Airlangga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkelanjutan meningkat menuju 6 persen. Namun, ia mengingatkan perlunya menjaga momentum setelah Lebaran, mengingat kuartal II dan III relatif minim agenda besar.

Dalam pembincangan itu, Airlangga

## Saham Gorengan

... DARI HALAMAN 1

sebelumnya telah menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 50 juta kepada emiten-emiten tersebut karena tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, sanksi tersebut tidak dipenuhi oleh para emiten sehingga bursa memberlakukan sanksi lanjutan berupa suspensi perdagangan saham. “Bursa memutuskan untuk tetap melakukan suspensi terhadap 38 perusahaan tercatat sebagaimana tercantum dalam tabel,” demikian tertulis dalam surat resmi BEI, Rabu (4/2/2026).

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengeledah kantor PT SSI yang berlokasi di Equity Tower, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa

## Gub NTT: Anak SD

... DARI HALAMAN 1

nasional. Berbagai kalangan, dari pejabat eksekutif hingga legislatif merasa prihatin dengan tragedi yang sangat memilukan itu.

Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengaku prihatin, kasus seperti ini harus terjadi.

“Ke depan, tidak boleh terjadi lagi,” ujar Cak Imin, sapaannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia meminta, seluruh pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah peka terhadap penderitaan rakyat. Para pejabat dan wakil rakyat, mestinya meningkatkan

## KPK OTT Di Jakarta

... DARI HALAMAN 1

ujar Budi.

KPK menduga terdapat praktik pengaturan dalam proses restitusi di sektor perkebunan yang disertai penerimaan sejumlah uang oleh oknum pegawai pajak. Dari hasil penindakan, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp 1 miliar yang diduga berkaitan dengan pengurusan restitusi pajak.

Mengenai konstruksi perkara, KPK masih melakukan pendalaman. Budi menyebut, para pihak yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah pemeriksaan rampung, KPK akan menyampaikan perkembangan perkara secara lebih rinci.

“Termasuk juga dugaan perbuatan melawan hukum dari para pihak seperti apa, sehingga nanti diputuskan konstruksi pasalnya kita menggunakan pasal

didampingi Juru Bicara Kemenko Per-ekonomian Haryo Limanseto. Sementara dari *Rakyat Merdeka*, hadir CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Wakil Pemimpin Redaksi Kartika Sari, Pemred RM Digital Firsty Hestyarini, Asisten Redaktur Eksekutif Bambang Trismawan serta fotografer Khairizal Anwar. Berikut petikan selengkapnya.

**Bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi nasional saat ini, terutama menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) besok (hari ini, red)?**

Besok angka pertumbuhan ekonomi akan diumumkan dan kelihatannya di atas 5 persen, sekitar 5 koma sekian. Saya sendiri lebih optimistis di kisaran 5,3 persen. Kalau rata-rata tahunan (one year average) kita sekitar 5,1 persen, sementara target pemerintah 5,2 persen. Kita lihat besok angkanya. Untuk kuartal ini, seharusnya lebih baik karena basis tahun lalu relatif rendah.

Memasuki 2026, bagaimana pemerintah memanfaatkan momentum konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di lapisan bawah?

Ya, harapannya kuartal I bisa bagus karena konsumsi biasanya meningkat. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk menyemangati pasar, terutama di lapisan bawah.

**Langkah konkret apa saja yang disiapkan pemerintah agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat?**

Pemerintah melanjutkan bantuan sosial, antara lain bantuan pangan selama dua bulan, termasuk minyak goreng. Cakupan penerimanya juga diperluas. Kalau tahun lalu sampai desil 2, sekarang diperluas sampai desil 4. Tahun lalu penerimanya sekitar 18 juta orang, sekarang sekitar 35 juta orang. Ini membantu menekan inflasi karena masyarakat sudah mendapatkan kebutuhan pokok. Tahun lalu, subsidi listrik pada

(3/2/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana di sektor pasar modal berupa praktik saham gorengan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, penggeledahan merupakan pengembangan perkara tindak pidana pasar modal yang sebelumnya telah ditangani penyidik dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bareskrim juga mendalami potensi tindak pidana lain yang berkaitan dengan gejala pasar saham, termasuk anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyatakan, pihaknya mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan kejahatan pasar modal. Menurut dia, apabila terdapat informasi mengenai perusahaan tercatat yang tengah diproses oleh aparat penegak hukum, hal tersebut

respons terhadap kesulitan ekonomi masyarakat.

“Apabila memang ada yang membutuhkan bantuan alat tulis atau bantuan apapun, harus segera ditindaklanjuti,” kata Cak Imin,

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk menggugah kepedulian masyarakat luas. Politisi berdarah NTT itu menganggap peristiwa ini sebagai tragedi memilukan.

“Ini amat memilukan semua kita yang mempunyai hati,” ucap Hugo prihatin la menyebut, peristiwa ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk membenahi kehidupan sosial. Ia berharap, tragedi tersebut dapat menjadi pelajaran nasional agar masyarakat lebih

apa,” terangnya.

Untuk OTT di Lampung dan Jakarta, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga melakukan korupsi dalam kegiatan impor barang. Jumlah orang yang diamankan belum dirinci. Budi hanya menyampaikan, salah satu pihak yang diamankan merupakan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan (P2) Bea dan Cukai. “Itu diamankan di wilayah Lampung,” ungkap Budi.

KPK menduga terdapat praktik korupsi dalam proses importasi yang melibatkan pejabat di lingkungan Bea dan Cukai. Dugaannya, berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengawasan dan penindakan barang impor.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan emas. Untuk uang, jumlahnya miliaran rupiah. Untuk emas, jumlahnya tidak main-main. “Mungkin sekitar 3 kilogram,” terang Budi.

KPK masih mendalami jenis barang

Januari juga berkontribusi terhadap deflasi, sehingga efeknya cukup terasa.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program diskon transportasi. Untuk angkutan laut dan kereta api diskonnya mencapai 30 persen, jalan tol sekitar 20 persen, dan tiket pesawat hingga 17 persen.

**Apakah diskon transportasi juga berlaku untuk mudik Lebaran?**

Ya, diskon tersebut berlaku untuk mudik Lebaran. Transportasi sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi. Pemerintah juga sudah memutuskan kebijakan work from anywhere, sehingga jadwal perjalanan kereta, pesawat, dan moda transportasi lain bisa diatur lebih fleksibel.

**Bagaimana dengan insentif fiskal lainnya?**

Pemerintah juga melanjutkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata. Insentif ini berlaku untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp 10 juta. Tahun ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lapisan bawah. Karena selama satu kuartal diperkirakan melibatkan anggaran sekitar Rp 80 triliun. Intinya, dalam tiga bulan pertama pemerintah ingin mendorong ekonomi rakyat. Jika ekonomi rakyat tumbuh, maka ekonomi menengah dan atas akan ikut terdorong.

**Dengan kondisi tersebut, strategi menuju pertumbuhan 6 persen apakah bisa lse dicapai?**

Kalau sekarang masih di kisaran 5 persen, prediksinya bisa menuju 6 persen. Tentu kita lihat perkembangannya. Tantangannya, Lebaran sekarang ada di kuartal I, sehingga kuartal II dan III relatif tanpa event besar. Ini yang harus kita siasati dengan menciptakan kegiatan agar ekonomi tetap bergerak.

Tahun ini IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,1 persen. Selisihnya kecil, sekitar 0,1 persen.

sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Sementara itu, BEI akan mencermati pola transaksi saham serta keterbukaan informasi yang disampaikan oleh emiten. “Karena kita akan melihat dari sisi pola transaksi, kemudian kita lihat disclosure informasi,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Bareskrim Polri. Ia menegaskan, penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing lembaga.

“Langkah ini sejalan dengan upaya percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia,” kata Hasan.

## Revisi UU P2SK

Sementara itu, Pemerintah dan DPR

Jadi sebenarnya sudah cukup dekat.

**Bagaimana perkembangan reformasi pasar modal? Setelah IHSG sempat anjlok hari ini sudah mulai rebound?**

Reformasi pasar modal merupakan amanat undang-undang. Roadmap-nya perlu diperjelas. Pengurus Otoritas Jasa Raharja (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sudah menargetkan proses demutualisasi. Regulasi juga harus segera diselesaikan. Yang penting, perusahaan bisa lebih mudah go public dan terbuka untuk private placement maupun IPO. Keterbukaan informasi (disclosure) juga akan diperkuat agar data dapat diakses investor secara transparan.

Dari sisi permintaan (demand side), juga perlu diperkuat. Karena itu, perusahaan asuransi dan BPJS didorong meningkatkan porsi portofolionya melalui revisi POJK. Reformasi ini dilakukan sesuai kebutuhan domestik, bukan semata-mata mengikuti indeks global.

**Bagaimana respons investor asing dengan reformasi tata kelola bursa saham?**

Dari pengumuman terakhir, tercatat net buy asing sekitar Rp 600 miliar. Artinya, kepercayaan mulai tumbuh terhadap perubahan yang kita lakukan, termasuk perubahan di OJK dan Bursa. Ini proses panjang, bukan satu hari selesai. Yang penting, reformasinya konsisten.

**Bagaimana perkembangan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat? Apakah masuknya Indonesia dalam Board of Peace akan mempengaruhi negosiasi tarif?**

Negosiasi tarif hampir selesai dan tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden. Isu geopolitik dan perdamaian dunia itu hal yang berbeda dan tidak berkaitan langsung dengan negosiasi tarif. Indonesia tentu mengambil manfaat untuk kepentingan bisnis dan ekonomi nasional. Angka terakhir yang kita lihat sekitar 19 persen, dan kita masih menunggu dokumen finalnya. ■

mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah disahkan sebagai usul inisiatif DPR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, revisi UU P2SK diperlukan untuk memperbaiki dinamika pasar, termasuk gejolak IHSG yang terjadi beberapa waktu terakhir akibat kurangnya transparansi. “Kita membutuhkan UU P2SK yang agile agar pelaku pasar bisa merespons dengan cepat ketika ada gangguan di sistem keuangan,” kata Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan, pembahasan revisi UU P2SK akan dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak agar memberikan respons positif bagi pasar. “Ini untuk memperkuat ekosistem industri keuangan agar lebih stabil dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun. ■ **MENBYU**





SUMBER: FB HUMAS PEMKAB BEKASI

## Asep Surya Atmaja Plt Bupati Bekasi Fokus Bangun Desa

PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mendorong pemerataan pembangunan di seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Dia menegaskan, tidak boleh ada desa yang terlewat dari program pembangunan, baik pada tahun anggaran 2026 maupun dalam perencanaan 2027.

Komitmen itu disampaikan Asep saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan, di Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Rabu (4/2/2026). Dalam kesempatan itu, dia mengabsen para kepala desa yang hadir, untuk memastikan tidak ada desa yang luput dalam perencanaan pembangunan.

“Saya sengaja mengabsen para kepala desa yang hadir. Saya tidak ingin ada desa yang luput dari perhatian Pemerintah Daerah (Pemda), atau tidak merasakan dampak pembagunan,” tegasnya.

Berdasarkan laporan yang dia terima, terdapat satu desa di Kecamatan Cikarang Utara, yang belum memperoleh alokasi pembangunan pada tahun anggaran 2026. Asep meminta kondisi tersebut segera diperbaiki melalui pergeseran program.

“Saya sudah menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan pergeseran (alokasi anggaran). Saya ingin, di tahun 2027 nanti, pembangunan dilakukan secara berkeadilan, utara, tengah, selatan, semua harus sama rata,” pintanya.

Politisi Partai Buruh itu menambahkan, alokasi anggaran pembangunan desa

di Kabupaten Bekasi, hampir mencapai Rp 1 triliun. Harusnya, tegas dia, setiap desa bisa memperoleh alokasi pembangunan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. “Minimal, satu desa satu miliar. Masa tidak bisa?” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asep menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Dia menegaskan, Musrenbang tak boleh menjadi agenda seremonial, harus memberi membawa dampak nyata bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bappeda, BPKD, dan DPRD, harus mengawal hasil Musrenbang. Jangan sampai, Musrenbang tidak ada hasilnya. Ini jerih payah para kepala desa dan masyarakat, yang sudah berproses dari desa sampai kecamatan,” cetusnya.

Dia juga menekankan tentang pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk penanganan kondisi darurat seperti banjir. Menurut Asep, jika terjadi situasi mendesak, Pemda harus mampu mengeksekusi pembangunan pada tahun berjalan, meski belum tercantum dalam usulan awal.

“Kalau situasinya banjir, jangan tunggu diselesaikan pada tahun 2027. Kalau bisa dieksekusi tahun ini, ya selesaikan sekarang. Jangan sampai, masyarakat menjadi korban atas lambatnya penanganan dan belum adanya perencanaan,” tandasnya. ■ **KAL**



**MERTI DUSUN:**  
Sejumlah warga bedoa bersama saat acara tradisi Merti Dusun di kawasan lereng Gunung Sumbing Desa Tanggulangin, Selopampang, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Tradisi turun temurun tersebut dilaksanakan masyarakat setempat untuk mendoakan arwah leluhur sekaligus merupakan wujud kerukunan dan ajang silaturahmi warga pedesaan.

ANTARA FOTO/IANIS EFIZUDIN/OC

# Tolak SK Penunjukan Plt Ketua DPW 33 DPC PPP Se-Sumut Ancam Boikot Muswil

**Penolakan terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menguat. Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Provinsi Sumut mengancam akan memboikot Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sumut, yang akan digelar, Minggu (8/2/2026).**

POLEMIK DPW PPP Sumut berawal dari Suarat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, yang menetapkan Sarmadan Nur Siregar sebagai Plt Ketua DPW PPP Sumut. DPP mencopot Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap, lantaran menolak mempercepat pelaksanaan Muswil DPW PPP Sumut. Sekretaris DPW PPP Sumut, Usman Effendi Sitorus menyatakan, seluruh DPC PPP se-Provinsi Sumut menolak penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut, Sarmadan Nur Siregar. Menurutnya, penolakan 33 DPC PPP se-Provinsi Sumut itu disampaikan melalui surat tertulis, yang diserahkan kepada Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap, Selasa (3/2/2026).

“Penolakan terhadap SK DPP terkait penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut, akan diikuti dengan langkah dan komitmen seluruh pengurus DPC. Mereka tidak akan menghadiri Muswil yang digelar oleh Plt Ketua DPW PPP Sumut, yang akan digelar, Minggu (8/2/2026),” ujarnya di Medan, Sumut, Rabu (3/2/2026). Usman menambahkan, seluruh pengurus DPW dan DPC PPP se-Provinsi Sumut juga akan menolak semua kebijakan dan program yang dijalankan Plt Ketua DPW PPP Sumut beserta jajarannya. Sebab, SK DPP tentang Plt Ketua DPW PPP Sumut, melanggar aturan perundang-undangan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

tangani oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, dan Wakil Sekretaris Jenderal, Jabbar Idris, tidak sah secara hukum. Kewenangan penandatanganan SK perubahan atau pergantian kepengurusan berada pada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP,” tegasnya.

Lebih lanjut, Usman memastikan, seluruh jajaran DPW dan DPC PPP se-Provinsi Sumut tetap solid, serta mengikuti kepemimpinan Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap. Menurutnya, SK DPP tentang penunjukan Plt Ketua DPW PPP Sumut, tak akan merusak konsolidasi organisasi DPW PPP di Sumut.

“Buktinya, semua kompak melawan keputusan tersebut. Kami berharap, realitas ini bisa menjadi pertimbangan Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk mencabut kembali SK DPP yang cacat hukum itu,” ucapnya.

dijalankan dan dilanjutkan sampai menghadirkan situasi yang kondusif di internal partai. Dia berharap, DPP tak melakukan kegaduhan baru, yang berpotensi merusak solidaritas di tingkat pusat dan daerah.

“Akar masalah yang tidak tuntas, tidak selesainya legal formal AD/ART partai sebagai produk Muktamar X. Utamanya, pasal yang berkaitan dengan Ketua Umum dan Sekjen. Hal itu menyebabkan Sekjen menjadi tidak kapable dalam menjalankan fungsi sebagai motor organisasi,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang OKK DPW PPP Sumut, Aja Syahri menambahkan, selama 6 orang yang ada di SK Menteri Hukum belum menyelesaikan masalah AD/ART dan komposisi pengurus DPP PPP, mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penunjukan Plt dan menggelar Muswil di seluruh Indonesia.

“Kami tegas menolak SK tersebut. Kami menghimbau 6 orang petinggi partai di DPP PPP sesuai SK Menteri Hukum bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi

persoalan ini,” harapnya. Sementara, Plt Ketua DPW PPP Sumut, Sarmadan Nur Siregar menyatakan, pihaknya akan menggelar Muswil IX PPP Sumut di Balige, Kabupaten Toba, Minggu (8/2/2026). Menurutnya, kegiatan itu akan dihadiri oleh Ketua Umum PPP, Mohammad Mardiono. “Pemilihan lokasi di Balige dan kehadiran tokoh nomor satu di partai, menjadi simbol keseriusan PPP dalam merajut kekuatan politik di seluruh wilayah Sumut,” imbuhnya. Sarmadan menegaskan, Muswil bukan sekadar agenda rutin organisasi, tapi akan menjadi momentum mengembalikan kejayaan PPP di Provinsi Sumut. Menurut dia, Sumut memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis kekuatan utama PPP di Indonesia. “Kesuksesan pelaksanaan Muswil akan menjadi tolak ukur kemajuan partai ke depan. Kami akan membuktikan, PPP tetap solid dan siap menghadapi seluruh agenda demokrasi,” tandasnya. ■ **OSP**

**PENGUMUMAN**  
**PENAWARAN SAHAM DI PT POJOK CELEBES MANDIRI**  
PT Sigma Cipta Caraka, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Graha Telkom Sigma II, Jl. CBD Lot VIII No. 8, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321 (“Telkomsigma”) selaku pemegang dan pemilik dari 2.604 (dua ribu enam ratus empat) lembar saham (“Saham Telkomsigma”) dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan puluh sembilan) pada PT Pjok Celebes Mandiri, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Pontner Creative Center Lantai 2, Jalan RS. Fatmahanjaya No. 10, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12430 (“Perseroan”), dengan ini bermaksud untuk melakukan pengumuman terkait dengan kepemilikan Saham Telkomsigma di Perseroan.  
Bahwa Telkomsigma bermaksud untuk melakukan penjualan atas seluruh Saham Telkomsigma dalam Perseroan (selanjutnya disebut “Saham Yang Dijual”) dengan menggunakan nilai dan/atau harga atas Saham Yang Dijual yang akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJP) yang diunjuk secara bersama-sama antara Para Pemegang Saham dengan pihak yang berminat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak-pihak yang berminat diundang untuk menyampaikan Surat Minat (Letter of Interest) atas rencana penjualan Saham Yang Dijual dimaksud. Surat Minat dapat disampaikan secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai:  
1. Identitas calon pembeli/investor;  
2. Profil singkat badan usaha atau perorangan;  
3. Indikasi minat terhadap jumlah dan/atau porsi saham; dan  
4. Informasi kontak yang dapat dihubungi.  
Surat Minat disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini, kepada:  
**PT Sigma Cipta Caraka**  
Graha Telkom Sigma II, Jl. CBD Lot VIII No. 8,  
Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong,  
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15321  
U.P.: Direksi  
Untuk koordinasi lebih lanjut dalam hal surat minat terhadap rencana penjualan saham Telkomsigma pada Perseroan dapat menghubungi Saudara Muhammad Chasby Sidiq, VP Corporate Planning and Transformation Management Telkomsigma, email: chasby.sidiq@sigma.co.id, hp: 08113400052.  
Pengumuman ini bukan merupakan penawaran yang bersifat mengikat, dan setiap tindak lanjut atas Surat Minat yang diterima akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, serta kebijakan internal Para Pemegang Saham.  
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.  
Jakarta, 5 Februari 2026  
PT Sigma Cipta Caraka  
TTD  
Direksi  
PT Pjok Celebes Mandiri  
TTD  
Direksi

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**PENGADILAN NEGERI DEPOK**  
Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Grand Depok City Kota Depok  
Telp. (021) 7829167 – Fax: (021) 7829169  
Website : [www.pn-depok.go.id](http://www.pn-depok.go.id)  
**RELAAS PANGGILAN SIDANG**  
Nomor : 429/Pdt.G/2025/PN.Dpk  
Pada hari ini : Kamis, Tanggal 5 Februari 2026 : Saya :  
“**TRISNO WIDODO, SH.MK.**”  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok, atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor : 429/Pdt.G/2025/PN.Dpk, dan diunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini :  
**TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :**  
**DIREKTUR PT. GRIYA LARISTA - BALAI LELANG**, Arteri Permata Hijau No. 11 Jin. Permata Hijau RT 2 RW 10, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **----- TURUT TERGUGAT III**;  
Supaya ia/mereka datang menghadap sidang persidangan Pengadilan Negeri Depok yang diselenggarakan di Jalan Boulevard No. 7 komplek Perkantoran Kota Depok, pada :  
Hari : **Selasa**  
Tanggal : **24 Februari 2026**  
Jam : **09. 00 WIB**  
Agenda : **Kelengkapan Para Pihak**  
Sehubungan akan dilaksanakan pemeriksaan perkara perdata Nomor: 429/Pdt.G/2025/PN.Dpk., yakni antara:  
**AHMAD TAUFIK** ----- sebagai **Penggugat**;  
**APRI (Anli Waris Pengganti DUKI BIN KETJIL BLONDJO), Dkk** ----- sebagai **Para Tergugat**;  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT C.Q. WALIKOTA DEPOK C.Q. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG C.Q. KEPALA KANTOR KELURAHAN CIPAYUNG JAYA, Dkk** ----- sebagai **Para Turut Tergugat**;  
Selanjutnya kepadanya saya beritahukan bahwa atas gugatan tersebut ia / kuasanya dapat mengambil salinan salinan Gugatan Penguat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada setiap hari kerja, dan atas gugatan tersebut mereka dapat menjawabnya baik lisan ataupun tertulis, yang diadatangannya sendiri atau oleh kuasanya yang sah, dan diserahkan dipersidangan tersebut.  
Demikian panggilan ini dilaksanakan melalui iklan/pengumuman dan kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.  
**JURUSITA TERSEBUT**  
Ttd.  
**TRISNO WIDODO, SH.MH.**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
**PROVINSI DKI JAKARTA**  
Jalan Raya Tj. Barat No.1, RW.11, J. Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7884 766, Email : [kot-jaksel@astptn.go.id](mailto:kot-jaksel@astptn.go.id)  
**PENGUMUMAN**  
**TENTANG SERTIPIKAT HILANG**  
Nomor : 23/2026  
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:  

| No. | Nama/Alamat Pemohon                                                                                                                    | Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak            | NIB   | Terdaftar Atas Nama                    | Tanggal Pembukuan | Letak Tanah : a. Jalan b. Desa/Kel. c. kec.                       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Suhartatik<br>Jl. Haji Raya No.12 RT 009 RW 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan | Hak Milik Nomor 2090 Kelurahan Gandaria Utara | 02340 | Nyonya Suhartatik, Bachelor of Science | 21 Januari 2009   | a. H.Raya RT.009 RW.010 No.12 b. Gandaria Utara c. Kebayoran Baru | - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kapoles Metro Jaksel Ps.Panit III SPKT Nomor: 5954/B/XII/2024/Res Jak-Sel tanggal 06 Desember 2024.<br>- Surat Pengantar Laporan Kehilangan dari Kapoles Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Nomor:B/2097/XII/ RES.1/2/2025 tanggal 30 November 2025. |

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.  
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 86496/2025  
Nama Pemohon : Suhartatik  
DI 301 : 36899/2025

Jakarta, 4 Februari 2026  
a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Ttd  
Marcellinus Wiendarto, S.H., M.H.  
NIP. 19860426 2011011008

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**  
Jl. P. B. Sudirman No. 1 DENPASAR 80113 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com), websites : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id)  
**PENGUMUMAN**  
**Nomor 92/Pdt.Eks/2025/PN Dps**  
**jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps**  
**Tentang:**  
**PANGGILAN AANMANING**  
Saya I Wayan Gara selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.Eks/2025/PN Dps, jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 4 Februari 2025, ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, dengan ini memanggil:  
**PT. Primadaya Sakti,**  
Dahulu tempat kedudukan di Jalan Raya Gading Indah Nomor 8 Kavling A-11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon Eksekusi I semula Tergugat I.  
Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026**, Jam **10:00 WITA**, untuk diberikan teguran/aanmaning, supaya ia/mereka dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran/aanmaning melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara:  
PT. Bank MNC International Tbk., sebagai Pemohon Eksekusi semula Penguat;  
Melawan  
PT. Primadaya Sakti,dkk. sebagai Para Termohon Eksekusi semula Para Tergugat;  
Dan  
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, dkk. sebagai Para Turut Termohon Eksekusi semula Para Turut Tergugat;  
Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan.  
Demikian pengumuman ini dibuat.  
Denpasar, 5 Februari 2026  
Jurusita  
**I WAYAN GARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**  
Jl. P. B. Sudirman No. 1 DENPASAR 80113 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com), websites : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id)  
**PENGUMUMAN**  
**Nomor 92/Pdt.Eks/2025/PN Dps**  
**jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps**  
**Tentang:**  
**PANGGILAN AANMANING**  
Saya I Wayan Gara selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.Eks/2025/PN Dps, jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 4 Februari 2025, ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, dengan ini memanggil:  
**Handoyo Makmur**  
Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya Nomor 21, RT.004/013, Tugu Utara, Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon Eksekusi II semula Tergugat II.  
Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026**, Jam **10:00 WITA**, untuk diberikan teguran/aanmaning, supaya ia/mereka dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran/aanmaning melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara:  
PT. Bank MNC International Tbk., sebagai Pemohon Eksekusi semula Penguat;  
Melawan  
PT. Primadaya Sakti,dkk. sebagai Para Termohon Eksekusi semula Para Tergugat;  
Dan  
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, dkk. sebagai Para Turut Termohon Eksekusi semula Para Turut Tergugat;  
Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan.  
Demikian pengumuman ini dibuat.  
Denpasar, 5 Februari 2026  
Jurusita  
**I WAYAN GARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI DENPASAR**  
**PENGADILAN NEGERI DENPASAR**  
Jl. P. B. Sudirman No. 1 DENPASAR 80113 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : [pn.denpasar@gmail.com](mailto:pn.denpasar@gmail.com), websites : [www.pn-denpasar.go.id](http://www.pn-denpasar.go.id)  
**PENGUMUMAN**  
**Nomor 92/Pdt.Eks/2025/PN Dps**  
**jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps**  
**Tentang:**  
**PANGGILAN AANMANING**  
Saya I Wayan Gara selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.Eks/2025/PN Dps, jo. Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 4 Februari 2025, ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, dengan ini memanggil:  
**PT. Gading Surya Pratama,**  
Dahulu tempat kedudukan di Jalan Raya Gading Indah Nomor 8 Kavling A-11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon Eksekusi III semula Tergugat III.  
Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026**, Jam **10:00 WITA**, untuk diberikan teguran/aanmaning, supaya ia/mereka dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran/aanmaning melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 951/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara:  
PT. Bank MNC International Tbk., sebagai Pemohon Eksekusi semula Penguat;  
Melawan  
PT. Primadaya Sakti,dkk. sebagai Para Termohon Eksekusi semula Para Tergugat;  
Dan  
Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara, dkk. sebagai Para Turut Termohon Eksekusi semula Para Turut Tergugat;  
Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan.  
Demikian pengumuman ini dibuat.  
Denpasar, 5 Februari 2026  
Jurusita  
**I WAYAN GARA**

Saksikan Video Wawancara Kami  
Bersama Narasumber Hebat.  
Hanya di Kanal Youtube Rakyat Merdeka TV  
  
SUBSCRIBE  
Rakyat Merdeka



## Sikap Demokrat Soal PT Tolak Penghapusan Parliamentary Threshold



Herman Khaeron

SEKRETARIS Jenderal (Sek-jen) Partai Demokrat, Herman Khaeron menolak penghapusan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* (PT). Dia menilai, ambang batas tetap perlu dipertahankan demi memperkuat sistem politik presidensial di Indonesia.

“Menurut saya, urgensi ambang batas parlemen ini masih harus ada. Artinya, partai dan fraksi belum bisa ditentukan begitu saja. Ambang batas diperlukan karena merupakan bagian dari upaya penyederhanaan partai,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Herman mengungkapkan, Indonesia memiliki pengalaman dengan banyaknya partai politik (parpol) pada awal reformasi, serta pernah melakukan penyederhanaan menjadi tiga partai pada era Orde Baru. Jumlah partai yang terlalu banyak, kata dia, justru berpotensi memunculkan polemik di parlemen.

“Artinya, ada banyak pertimbangan. Kalau pun alasan utamanya merujuk pada keputusan MK, ambang batas parlemen tetap ada, hanya besarnya yang ditinjau ulang,” jelasnya.

Senada disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia menegaskan, ambang batas dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik, dan sekaligus memastikan efektivitas kinerja parlemen.

## Target 2026 Dinilai Strategis Gerindra Apresiasi Menteri Investasi

PARTAI Gerindra mengapresiasi kinerja Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani dalam menjaga iklim investasi nasional, guna mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Termasuk, dalam menetapkan target investasi nasional 2026 sebesar Rp 2.175 triliun.

Politikus Partai Gerindra, Rokhmat Ardiyan mengatakan, target investasi nasional pada 2026 dinilai sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga kisaran 6-7 persen. Rokhmat optimistis target itu dapat tercapai dengan konsistensi kepemimpinan Menteri Investasi dalam menjaga kepercayaan investor serta membangun hubungan baik lintas negara.

“Kami mengapresiasi dan mendorong agar target investasi 2026 dapat tercapai. Manfaatnya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Rokhmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (4/2/2026).

Anggota Komisi XII DPR ini menilai, capaian investasi nasional selama ini menunjukkan tren positif. Bahkan, kata dia, realisasi investasi melampaui target dan mampu menyerap sekitar 2,7 juta tenaga kerja. Selain itu, kata dia, investasi juga tidak lagi terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa, melainkan telah menyebar ke berbagai wilayah seperti Sulawesi, Sumatera, dan daerah lainnya.

“Pemerataan investasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Rokhmat menekankan pentingnya kebermanfaatan investasi bagi masyarakat sekitar kawasan industri, termasuk UMKM dan tenaga kerja lokal. Dia mengajak anggota Komisi XII DPR dapat mendorong Kementerian

“Ambang batas sebesar 4 persen yang saat ini berlaku masih relevan dengan kondisi politik Indonesia,” tandas Cak Imin sesuai melantik 190 kader Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB dari 38 provinsi di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Muhaimin mengatakan, mekanisme ambang batas parlemen sebagai bentuk seleksi alam bagi partai politik. Sehingga, kata dia, hanya partai dengan dukungan riil dari masyarakat yang dapat melenggang ke parlemen.

“Tanpa itu (ambang batas), akan terlalu banyak hiruk-pikuk yang tidak produktif,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia ini.

Menurut Cak Imin, kemunculan banyak partai politik (parpol) baru merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kata dia, tanpa ambang batas yang jelas, parlemen justru berpotensi dipenuhi fragmentasi kepentingan yang menyulitkan pengambilan keputusan strategis.

“Multipartai dengan hasil yang sama dan berulang dalam pemilu itu tidak efektif. Oleh karena itu, *parliamentary threshold* bertujuan agar kita tidak sekadar mengulang pola yang sama, tetapi benar-benar menghasilkan partai yang teruji,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno mengusulkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menilai, regulasi tersebut justru mengurangi semangat demokrasi.

“PAN sejak awal menginginkan penghapusan ambang batas, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Dengan adanya ambang batas, jutaan pemilih tidak terwakili di DPR karena partainya tidak lolos. Jumlahnya tidak kecil, mencapai belasan juta,” ujar Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). ■ BSH



**PKB BERTEMU PRESIDEN:** Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) didampingi sejumlah Ketua DPW PKB seluruh Indonesia memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut untuk audiensi terkait Rakernas PKB serta mengenalkan pengurus DPP dan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di seluruh Indonesia ke Presiden Prabowo.

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA/BAR

## Cak Imin Bawa Pasukan Ke Istana PKB Tegaskan Dukung Penuh Prabowo Subianto

**Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, membawa jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2026).**

DALAM kesempatan tersebut, Cak Imin memperkenalkan pasukan partainya, sekaligus menyampaikan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan serta program-program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Beberapa hal telah kami sampaikan. PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang secara langsung dinikmati oleh rakyat. Bahkan, kami siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis tersebut,” beber Cak Imin.

Pada kesempatan yang sama, Cak Imin juga menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo untuk ber-

gabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Presiden Prabowo memahami isu-isu geopolitik global. Oleh karena itu, PKB mendukung penuh, baik melalui jalur legislatif maupun melalui berbagai gerakan sosial dan keagamaan di semua level di Indonesia,” ujarnya.

Muhaimin juga mendukung kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. PKB, kata dia, menilai Prabowo tengah melakukan perubahan terhadap sistem ekonomi konstitusi. Yakni, melanjutkan sistem ekonomi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Pokok utama pertemuan kami adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden,” katanya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia ini mengaku puas dengan kepemimpinan Prabowo. Dia yakin, Prabowo akan sukses memimpin Indonesia, bahkan hingga 10 tahun ke depan.

“Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin bangsa ini bukan hanya lima tahun, tetapi hingga sepuluh tahun ke depan,” tandas Muhaimin. Diketahui, Cak Imin hadir bersama pengurus DPP dan DPW PKB se-Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dia tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 11.50 WIB dengan mengenakan jas hijau khas PKB.

Awalnya Cak Imin datang sendiri, kemudian disusul oleh pengurus PKB lainnya. Dia mengungkapkan, seluruh pengurus DPP dan DPW PKB yang baru dilantik pada Selasa, 3 Februari 2026, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Audiensi

dilakukan dalam rangka rapat kerja nasional (Rakernas) PKB, sekaligus memperkenalkan pengurus baru DPW PKB.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany menjelaskan, pertemuan tersebut menunjukkan niat baik partainya, kehendak politik yang kuat, visi kepemimpinan yang jelas, serta keberpihakan Presiden kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Menurut Najmi, Presiden Prabowo memiliki komitmen serius untuk memastikan pembangunan nasional tidak meninggalkan siapa pun. Keberpihakan kepada rakyat kecil, kata dia, bukan sekadar retorika, tetapi menjadi fondasi utama dalam arah kebijakan yang dibangun.

Najmi melanjutkan, di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ditandai oleh ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan tekanan sosial, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, stabil, dan berani mengambil keputusan strategis.

“Oleh karena itu, semua pihak, termasuk kaum muda, perlu bersatu dan memberikan dukungan penuh agar agenda besar membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera dapat terwujud. Ini bukan hanya tanggung jawab Presiden, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Kaum muda, kata Najmi, tidak boleh menjadi penonton dalam proses pembangunan bangsa. Dia mengatakan, dukungan politik, partisipasi aktif, serta sikap optimistis generasi muda menjadi modal penting dalam menjaga arah perjalanan Indonesia ke depan.

“Di tengah dunia yang sedang sengkarut dan penuh ketidakpastian, Indonesia tidak boleh ikut gamang. Kita harus melangkah maju dengan keberanian, persatuan, dan keyakinan sebagai bangsa besar. Masa depan Indonesia hanya bisa diwujudkan jika seluruh rakyat turut mendukung arah kepemimpinan nasional,” pungkasnya. ■ BSH

### Trending Topics

Sama Dengan Covid-19, Serang Paru-paru

## Menkes Ingatkan Bahaya Virus Nipah

MENTERI Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memastikan, Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah masuknya virus Nipah ke Indonesia. Di antaranya dengan melakukan penguatan surveilans, kesiapan laboratorium, serta penyediaan alat screening berbasis PCR di sejumlah wilayah.

“Kita udah siapin reagen-reagen-nya. Jadi kalau ada orang yang dicurigai, batuk nggak sembuh-sembuh, karena ini sama sama Covid-19 yang menyerang paru-paru, kita *screen*,” kata Budi di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menkes menambahkan, pemeriksaan ini penting untuk membedakan penyebab gejala pernapasan, apakah disebabkan oleh virus influenza, Covid-19, atau virus Nipah. Meski begitu, kata dia, di Indonesia belum ditemukan adanya kasus positif virus Nipah.

“Surveilansnya kita perkuat. Kita belum melihat, dan itu sesuai juga rekomendasi WHO, untuk menutup border. Karena yang kita lihat, masih sangat sedikit yang terkena penyakit ini,” bebernya.

Terkait kebijakan perbatasan, Budi menegaskan, Pemerintah belum berencana melakukan penutupan akses keluar-masuk negara. Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO yang menilai jumlah kasus virus Nipah secara global masih sangat sedikit.

“Pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait virus Nipah dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia,” tandas Budi.

Anggota Komisi IX DPR,

Neng Eem Marhamah Zulfa mendorong Pemerintah untuk meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit *zoonosis* (penularan dari hewan ke manusia). Menurut dia, langkah ini mendesak setelah kemunculan ancaman global virus Nipah yang ditularkan melalui hewan seperti kelelawar dan babi.

“Pemerintah harus memanfaatkan platform digital secara masif untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana protokol berinteraksi dengan hewan dan menjaga kebersihan pangan agar tidak terkontaminasi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengusulkan agar kementerian terkait memproduksi konten edukasi kreatif yang mudah dipahami. Terutama mengenai cara mencuci buah dengan benar dan menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh hewan liar. Kampanye ini diharapkan mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui media sosial dan jaringan komunikasi publik.

“Protokol kesehatan harus berevolusi. Masyarakat perlu tahu bahwa menjaga kebersihan makanan, seperti mencuci buah yang mungkin terpapar air liur kelelawar, merupakan bagian dari pertahanan kesehatan nasional kita saat ini,” jelasnya.

Selain itu, Neng Eem juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pakar kesehatan manusia dan pakar kesehatan hewan dalam menyusun narasi kampanye tersebut. Hal ini bertujuan agar infor-

masi yang sampai ke masyarakat bersifat akurat dan berbasis sains, namun tetap sederhana.

“Kita harus proaktif. Kampanye digital yang cerdas dan tepat sasaran akan membangun kewaspadaan publik tanpa memicu kepanikan. Tujuannya adalah membangun kemandirian masyarakat dalam menerapkan proses secara sadar sebagai gaya hidup baru,” sebutnya.

Terpisah, pemerhati kesehatan global dan keamanan kesehatan dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mohamad Ainul Maruf mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya nasional menyusul merebaknya kembali kasus infeksi virus Nipah di sejumlah negara.

“Respons terhadap ancaman Nipah tidak boleh bersifat reaktif semata. Kita belajar dari Covid-19 bahwa keterlambatan deteksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat berakibat fatal,” tuturnya.

Maruf menjelaskan, kerangka International Health Regulations (IHR) yang telah diperbarui menekankan pendekatan *whole of government* dan *whole of society*. Dengan demikian, kata dia, kesiapsiagaan bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, transportasi, hingga Pemerintah Daerah (Pemda) dan komunitas.

“Dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan interaksi manusia-hewan yang semakin intens, risiko penyebaran lintas wilayah menjadi perhatian serius dalam konteks keamanan kesehatan global,” ujarnya.

RUKKI, kata Maruf, menyam-

but baik terbitnya Permenkes nomor 1 tahun 2026 tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan. Kebijakan itu, kata dia, sebagai langkah penting memperkuat fondasi kesiapsiagaan nasional. Yaitu, kewajiban sistem kewaspadaan dini berbasis risiko, penguatan surveilans.

“Termasuk penyakit zoonotik, peningkatan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, sistem pelaporan terintegrasi, serta penyusunan rencana kontinjensi dan mekanisme respons darurat hingga tingkat daerah,” katanya.

Di media sosial X, warganet ramai menyoroti upaya mengantisipasi wabah virus Nipah. Meski belum ditemukan kasus virus tersebut di Indonesia, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.

Akun *@arkanafs* yakin langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dapat mencegah penyebaran virus Nipah di Indonesia. “Kemenkes sudah mengeluarkan kewaspadaan terkait virus Nipah. Di Indonesia sendiri dilaporkan belum ada kasus terkait virus Nipah, dan semoga selalu nihil. Jadi masyarakat tidak perlu panik berlebihan, namun tetap waspada,” ujarnya.

Akun *@ayang manis33* mengingatkan agar masyarakat untuk menjaga kebersihan, terutama makanan yang dikonsumsi. “Virus Nipah bisa menular dari hewan ke manusia lewat makanan, virus ini menyerang pernapasan dan saraf hingga dapat menyebabkan kematian. Terus jaga kebersihan ya kawan-kawan. Gak ada salahnya buat waspada,” katanya.

Akun *@ferizandra* menuturkan, kasus virus Nipah di India perlu

dijadikan peringatan dan langkah antisipasi di Indonesia. “Virus ini, yang dibawa oleh kelelawar pemakan buah, dapat menular dari hewan ke manusia maupun antar manusia, serta menyebabkan penyakit pernapasan parah dan peradangan otak. Saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus yang tersedia,” sebutnya.

Sementara, *@Marimar Aauw* menekankan, memakan buah yang bekas dimakan binatang jelas berbahaya, apalagi sampai menjadi sarana penularan virus Nipah. “Jangan makan buah yang bekas dimakan binatang atau kelihatan bekas krokotan. Entah kelelawar atau tupai. Jangan makan daging babi yang tidak dimasak matang. Karena itu berisiko infeksi virus Nipah. Berat ini gejalanya, bisa sampai radang otak,” terangnya.

Akun *@certisasikanan* menambahkan, buah bekas gigitan hewan seringkali menjadi sumber penyakit. “Di perkuliahan agroteknologi juga diajarkan bahaya buah bekas gigitan hewan, jadi harus langsung dijadikan pupuk atau dibuang. Bahkan dilarang keras membagikannya ke warga, apalagi ke ibu hamil,” ungkapnya.

Akun *@xeracunan* menimpali, sejak dulu orang-orang di kampung punya kepercayaan untuk tidak memakan buah bekas digigit kelelawar. “Nenekku bilang gini, gak boleh makan buah sisa digigit kalong, katanya bisa bikin badan busuk alias kanker, tapi ada juga orang yang suka makan karena kalong gak makan buah mentah jadi bisa sris krokot pasti sudah matang dan manis. Semoga aja kebiasaan ini gak bikin penyebaran virus Nipah,” bebernya. ■ OSP





## Asosiasi Emiten Dukung Reformasi Pasar Modal

Para petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan dengan pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Mereka menjelaskan berbagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan reformasi penguatan integritas pasar modal Indonesia.

Hadir dalam pertemuan yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Rabu (4/2/2026), Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua AEI Armand Wahyudi Hartono, Pjs Dirut Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, sejumlah pejabat dari OJK, BEI dan pengurus AEI.

Hasan menjelaskan, diskusi berjalan konstruktif membahas percepatan reformasi penguatan integritas pasar modal nasional, khususnya terkait kebijakan peningkatan porsi free float menjadi 15 persen.

Dalam pertemuan kemarin, kata Hasan, para emiten melalui AEI menyampaikan komitmen dukungan yang komprehensif terhadap arah kebijakan tersebut.

“Dukungan ini tidak hanya terkait peningkatan *free float*, tetapi juga mencakup beberapa pilar penting penguatan integritas pasar,” kata Hasan.

Hasan menegaskan, bahwa kebijakan free float ini merupakan bagian integral dari agenda reformasi pasar modal Indonesia.

Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur pasar, meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor publik, serta mendorong tata kelola emiten yang semakin baik dan transparan.

Menurutnya, penerapan free float yang lebih terbuka dan memadai akan meningkatkan porsi partisipasi publik dalam kepemilikan saham, memperkuat kontrol publik terhadap emiten, dan menjadikan pasar modal Indonesia lebih atraktif bagi investor institusional global.

Dalam kesempatan itu, Armand menyatakan bahwa Asosiasi Emiten sangat mendukung penerapan kebijakan penerapan kebijakan free float yang dilakukan secara bertahap dan terukur, serta memperhatikan kemampuan pasar.

“Secara umum kami mendukung OJK dan SRO (*Self Regulatory Organization*) untuk mendorong pasar modal menjadi lebih tangguh,” kata Armand.

### Saling Support

Hasan menyebut, komitmen AEI ini mencerminkan keselarasan pandangan antara regulator dan pelaku industri, bahwa reformasi pasar modal harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pada struktur kepemilikan saham, tetapi juga pada aspek transparansi, tata kelola, dan kualitas partisipasi investor.

Menurutnya, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, terukur, dan berlandaskan dialog erat dengan industri serta pemangku kepentingan.

OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia akan memperhatikan kesiapan masing-masing emiten, kondisi pasar, serta kapasitas penyerapan investor.

“Pendekatan ini penting agar transisi berjalan sehat dan tidak menimbulkan disrupti yang tidak perlu,” katanya.

Sebagai langkah awal, OJK sedang menyusun kerangka indikatif yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan bursa, sehingga pelaku pasar memiliki kejelasan arah dan waktu penyesuaian yang memadai.

Bursa juga akan menyiapkan *hot desk*, serta tim khusus untuk mendampingi emiten dalam proses penyesuaian kebijakan ini.

Di saat yang sama, AEI juga akan secara intens melakukan koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan bersama OJK dan Bursa, guna menyiapkan dan menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang telah disepakati. ■ DWI



**BEBERKAN LANGKAH PENGUATAN PASAR MODAL:** Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi (kedua dari kiri) dan Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik (ketiga dari kiri) saat menjelaskan tindak lanjut pelaksanaan reformasi penguatan integritas pasar modal Indonesia dalam pertemuan dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

FOTO: DOK OJK

## Sudah Siapkan Stok Hadapi Ramadan

# ID Food Siap Gencarkan Gerakan Pangan Murah

**ID Food telah menyiapkan berbagai stok pangan dan program menjaga stabilitas harganya selama Ramadan dan Idul Fitri. Salah satunya, menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM).**

KOMODITAS pangan yang telah disiapkan meliputi gula, minyak goreng, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, serta telur.

Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary ID Food Yosdian Adi Pramono menegaskan, pihaknya berperan aktif dalam pengamanan pasokan dan stabilitas harga melalui pengelolaan komoditas utama.

“Hingga awal Februari 2026, kami telah menyiapkan stok gula lebih dari 29 ribu ton, minyak goreng 29 ribu kiloliter, daging ayam sekitar 3 ribu ton, telur ayam sekitar 2 ribu ton, serta daging ruminansia sekitar 40 ribu ton,” rinci Yosdian dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).

Yosdian menyebutkan, stok ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Bahkan ketersediaan per awal Februari akan disiapkan sebagai *buffer stock*, guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi jelang memasuki Ramadan.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, ID Food mengoptimalkan jaringan logistik dan perdagangan nasional yang mencakup 94 cabang, serta lebih dari 27 ribu mitra ritel.

Jaringan tersebut tersebar di 9.743 Koperasi Merah Putih, 1.414 titik Pasar Pantauan, dan 16.396 pasar reguler, serta didukung 5.202 mitra Warung Pangan di Pulau Jawa.

Terkait penyaluran di 1.414 titik Pasar Pantauan, Yosdian menuturkan, ID Food memfokuskan distribusi minyak goreng Minyakakita.

“Langkah ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng,” jelasnya.

Selanjutnya, alokasi Minyakakita yang dikelola ID Food diprioritaskan untuk didistribusikan ke *outlet* Pasar Pantauan.

Khususnya pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga komoditas dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan.

Hingga Februari 2026, alokasi Minyakakita yang sebelumnya sebesar 17.474 ton dari 16 produsen telah meningkat menjadi 33.273 ton, yang kini berproses melalui 68 produsen.

“Dengan dukungan saluran distribusi yang menjangkau seluruh provinsi, ID Food siap menyalurkan pangan secara langsung kepada masyarakat selama HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) 2026,” tuturnya.

Yosdian menekankan, distribusi pangan dilakukan secara langsung kepada masyarakat, dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai zona merah dan zona kuning, berdasarkan tingkat kerawanan pasokan dan disparitas harga.

Sebagai instrumen stabilisasi harga, ID Food juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) 2026 yang akan digelar di lebih dari 420 titik pada 26 cabang ID Food.

Komoditas yang disalurkan meliputi gula, minyak goreng, beras, tepung, serta kebutuhan



FOTO: ID FOOD/INSTAGRAM YOSDIAN ADI PRAMONO

**Yosdian Adi Pramono**



FOTO: BULOG

**Ahmad Rizal Ramdhani**

pokok lainnya.

“Dengan mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku,” ujarnya.

Sementara untuk pelaksanaan GPM dilakukan secara terkoordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Satgas (Satuan Tugas) Pangan.

Selain GPM, pada periode 9 Februari-15 Maret 2026, ID Food juga akan menggelar Bazar Sembako ID Food Ramadan Fair di 94 cabang distribusi.

Program ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pangan berkualitas dengan harga terjangkau selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Melalui program ini masyarakat dapat membeli langsung produk pangan seperti beras, gula, minyak goreng, daging ayam, dan garam dengan harga terjangkau di 94 kantor cabang ID Food,” tuturnya.

Yosdian menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab ID Food sebagai BUMN Pangan. Khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat pada HBKN.

Menurutnya, melalui sinergi lintas pemangku kepentingan

dan penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, diharapkan pasokan pangan selama HBKN dapat terjaga.

“Sehingga mendukung ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional 2026,” harapnya.

### Stok Beras Cukup

Senada, Perum Bulog memastikan ketersediaan beras nasional berada pada posisi yang sangat cukup guna menghadapi peningkatan konsumsi jelang momen penting seperti Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026.

Hingga awal Februari 2026, total stok yang dikuasai Bulog mencapai 3,3 juta ton. Jumlah ini terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,22 juta ton dan stok komersial sebanyak 95.523 ton, yang tersebar di seluruh gudang wilayah Indonesia sebagai instrumen penjaga stabilitas harga.

“Selain mengamankan cadangan, Bulog juga melaporkan progres signifikan pada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR

## Tiket Mudik Kereta Lebaran Laris Manis

PT Kereta Api Indonesia (Perseo) telah membuka pemesanan tiket kereta api reguler untuk sejumlah tanggal keberangkatan arus mudik, termasuk H-3, H-2, hingga H-1 Lebaran 2026.

Hingga 3 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, minat pelanggan pada periode puncak arus mudik menunjukkan tren yang signifikan alias penjualan laris manis.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, untuk keberangkatan H-3 Lebaran atau 18 Maret 2026, tiket yang telah terjual mencapai 54.387 tiket.

Sementara, penjualan tiket H-2 Lebaran atau 19 Maret 2026 tercatat sebanyak 56.250 tiket, dan untuk H-1 Lebaran atau 20 Maret 2026 telah terjual 39.380 tiket.

“Penjualan tiket Lebaran 2026 dilakukan secara bertahap mengikuti ketentuan H-45 sebelum tanggal keberangkatan,” kata Anne dalam keterangaan resmi, Rabu (4/2/2026).

Pola ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyusun rencana perjalanan mudik secara lebih terukur, sekaligus mendukung pengelolaan arus penumpang yang lebih seimbang selama periode mudik.

Anne menambahkan, perencanaan sejak dini menjadi kunci perjalanan mudik yang lebih nyaman.

Dengan mengikuti jadwal pembukaan tiket sesuai skema H-45, masyarakat dapat memantau ketersediaan tiket secara berkala dan menyesuaikan pilihan tanggal, maupun relasi perjalanan menggunakan layanan kereta api reguler.

Secara kumulatif, hingga 3 Februari 2026 pukul 10.00 WIB, penjualan tiket kereta api reguler Lebaran untuk periode keberangkatan arus mudik yang telah dibuka, yaitu 11 Maret hingga 20 Maret 2026, telah mencapai 382.047 tiket.

“Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring pembukaan penjualan untuk tanggal-tanggal berikutnya sesuai jadwal,” jelas Anne.



FOTO: FB PRIBADI

“Penjualan tiket Lebaran 2026 dilakukan secara bertahap mengikuti ketentuan H-45 sebelum tanggal keberangkatan.”

**Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba**

Berdasarkan data sementara, terdapat 10 stasiun tujuan dengan volume penumpang tertinggi, yaitu Purwokerto (18.161 pelanggan), Semarang Tawang (17.705 pelanggan), Yogyakarta (17.366 pelanggan), Kutoarjo (16.277 pelanggan).

Kemudian, Surabaya Pasar Turi (14.747 pelanggan), Pasar Senen (12.739 pelanggan), Kebumen (11.304 pelanggan), Tegal (11.232 pelanggan), Lempuyangan (10.823 pelanggan), Solo Balapan (10.578 pelanggan)

KAI mengimbau pelanggan yang belum memperoleh tiket pada tanggal atau relasi yang diinginkan, untuk terus memantau pembukaan penjualan tiket berikutnya sesuai skema H-45, serta mempertimbangkan alternatif tanggal keberangkatan yang tersedia.

“Pelanggan juga dapat memanfaatkan fitur *connecting train* melalui aplikasi *Access by KAI*, untuk menyusun perjalanan yang lebih fleksibel dan terencana,” pungkas Anne. ■ DWI

### Foto Seremonia



FOTO: PUTU WAHYU RAMA/RAKYAT MERDEKA/RM.ID

**LION PARCEL SIAP LAYANI LONJAKAN PENGIRIMAN PAKET:** Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto (kanan) dan Chief Experience Officer (CXO) Lion Parcel Budi Santoso saat memaparkan perjalanan 13 tahun bisnis Lion Parcel kepada media di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Lion Parcel menegaskan akan terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Salah satunya, Lion Air telah menyiapkan layanan untuk menghadapi potensi lonjakan pengiriman paket selama bulan Ramadan.

## Perkuat Pemberdayaan Masyarakat PNM Fokus Transformasi Ekosistem Ultra Mikro

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyampaikan transformasi ekosistem ultra mikro (UMi) akan menjadi salah satu fokus program pada tahun ini.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNM 2026, bagian dari sinergi *Holding* UMi bersama BRI dan Pegadaian, transformasi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.

Sekaligus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat subsisten agar memiliki akses permodalan dan pendampingan usaha yang lebih optimal.

“Saat ini PNM telah menjangkau 60.250 desa dan kelurahan dari total sekitar 84 ribu desa/kelurahan di Indonesia,” jelas Direktur Utama PNM Arief Mulyadi di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Jaringan layanan tersebut

melayani 22,9 juta nasabah yang secara konsisten mengikuti pertemuan mingguan bersama *Account Officer* (AO).

Dengan skala layanan yang terus membesar, PNM dituntut memperkuat sistem dan kualitas layanan, agar misi pemberdayaan dan akses pembiayaan dapat dijalankan secara lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Setiap tahun PNM menyalurkan dana minimal Rp 1 miliar di setiap desa,” katanya. Penyaluran ini, kata Arief, memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh keluarga prasejahtera, baik dari sisi peningkatan ekonomi maupun manfaat sosial.

“PNM terus berkomitmen melakukan transformasi melalui *re-modeling* proses bisnis, demi menciptakan nilai jangka panjang,” ucapnya. ■ DWI







 SUBSCRIBE



Marcus Rashford dengan tendangan yang tak mampu dibendung kiper lawan.

Albacete menipiskannya jarak di menit ke-87. Sundulando Javier Moreno yang menyambut tendangan bebas Jose Laza bersarang di sudut gawang Joan Garcia.

Ferran Torres kemudian sempat mencetak gol di menit ke-90, namun dianulir wasit Jose Munuera karena lebih dulu offside. Lawan Barca di semifinal akan diketahui pada laga besok, setelah seluruh undian delapan besar tuntas digelar. ■ **JON**

mengubah kemenangan ini menjadi trofi. Klub terakhir kali memenangkan Piala Liga adalah bawah asuhan George Graham pada 1993.

"Yang terpenting menyatukan tim, pemain dan semua pendukung kami untuk menikmati momen itu," kata Arteta.

"(Memenangkan trofi) adalah siklus yang ingin Anda ulangi terus-menerus, dan kita masih harus melakukannya," tandasnya. ■ JON

di peringkat kelima. Empat tim teratas di Liga Italia berhak lolos ke Liga Champions musim depan.

Meski tertinggal, Allegri tetap optimistik dan meminta semua pihak untuk melihat situasi timnya secara positif.

"Tertinggal 5 poin dari Inter atau keunggulan 7 poin dari Roma, mana yang lebih penting?" tanya Allegri, asal laga.

Eks pelatih Juventus itu menegaskan masih tersisa banyak laga untuk mengais poin.

"Mari menikmati istirahat ini dan memulihkan (kondisi) pemain untuk pertandingan melawan Pisa. Tujuan kami selalu berada di empat besar, dan itu akan rumit karena liga masih panjang," terang Allegri. ■ **JON**



**Milan menang 3-0 di kandang Bologna.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAKARTA**  
**PENGADILAN Negeri JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Baya Raya No. 24, 26, 28, Kd. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610  
 Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: [www.pn.jakartapusat.go.id](http://www.pn.jakartapusat.go.id)

---

## RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor: 849/Pdt.G/2025/PN.JKT.PST

Pada hari ini **Kamis Tanggal 05 Februari 2026**, Saya **EKA KUSUMA, SH**, Jursuta Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perintah dan di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini:

**TELAH MEMANGIL DENGAN RESMI KEPADA:**

**Pdt Obednego Mauri S.Th**, dahulu terakhir diketahui beralamat di Jl. Boing 5/102 Lt. Dasar Kemayoran, Jakarta Pusat, **sekarang** tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **ebagal**. **Tergugat I;**

Supaya datang menghadap dipersidangkan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Bungur Baya Raya No 24-26-28, Jakarta Pusat, nanti pada:

**HARI: Kamis, Tanggal 26 Februari 2026 Jam 10.00 WIB**

Adapun guna untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tercatat dalam Register Nomor: **849/ Pdt.G/ 2025/PN.JKT.PST**, dalam perkara antara:

**Gereja Katholik Inj (KINGMI) Di Tanah Papua** ..... sebagai **Penggugat;**  
**Lawan**  
**Pdt Obednego Mauri S.Th, Cs** ..... sebagai **Para Tergugat;**

Selanjutnya diberituhkan pula kepadanya bahwa ia/mereka dapat mengambil turunan surat gugatan dari Penguugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Baya No 24-26-28, Jakarta Pusat dan atas gugatan tersebut ia/mereka dapat mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan yang di tanda tangani sendiri atau kuasanya yang sah dan diserahkan di persidangan yang telah ditentukan tersebut diatas.

Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui ikin.

**JURUSITA PENGANTI**

**TTD**

**EKA KUSUMA, S.H.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</b><br/> <b>DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM</b><br/> <b>PENGADILAN TINGGI JAKARTA</b><br/> <b>PENGADILAN NEGRI JAKARTA PUSAT</b><br/>         Jalan Buntar Besar Raya No 24, 26, 28, 30, Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610<br/>         Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244400, Website: www.pn.jkt.pw.go.id</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;"><b>RELAKSASI SANGKAPAN</b><br/>         Nomor: 906/Pdt.Pw/2025/PN.Jkt.Pst.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pada hari ini: <b>Kamis tanggal 5 Februari 2026</b> saya: <b>DIAN ARIA ACHYANI, S.H.</b> Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, telah ditunjuk dan ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai Jurusita Pengganti, guna menyampaikan panggilan dengan resmi Kepada:</p> <p><b>Feky Julianto Makoekahing</b>, bertempat tinggal di Jl.Babakan Selakso, Kelurahan+Desa Cilembang Kecamatan Cheding, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, saat ini tidak diketahui lagi Keberadaannya di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sehingga pengajiannya disebut sebagai: <b>TERLAWAN IX</b>;</p> <p>Suapa ia/mereka datang menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan untuk di Jalan Buntar Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, nanti pada:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;"><b>Hari: SELASA, Tanggal: 24 FEBRUARI 2026, Jam: 10.00 WIB.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <p>Perlu saya untuk hadir pemeriksaan perkara Perdata Gugatan pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat dibawah Register Nomor: 906/Pdt.Pw/2025/PN.Jkt.Pst., Dalam perkara antara:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table border="0"> <tr> <td data-bbox="637 2831 684 2847"><b>DR. KUASA, S.H.,</b></td> <td data-bbox="684 2831 1044 2847" style="text-align: right;"><b>Sebagai PELAWAN;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2847 684 2866"><b>CLARA SIWY BA</b></td> <td data-bbox="684 2847 1044 2866" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN I;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2866 684 2882"><b>FREDDY JEFFERSON SIGALARKI</b></td> <td data-bbox="684 2866 1044 2882" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN II;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2882 684 2901"><b>NEELTYE PARANTU</b></td> <td data-bbox="684 2882 1044 2901" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN III;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2901 684 2917"><b>CHRISTINA A.D SIWY</b></td> <td data-bbox="684 2901 1044 2917" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN IV;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2917 684 2936"><b>HERMAN LEWU RIKSY SIWY</b></td> <td data-bbox="684 2917 1044 2936" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN V;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2936 684 2952"><b>MICHAEL EDWIN GUSTAAF V SIWY</b></td> <td data-bbox="684 2936 1044 2952" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN VI;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2952 684 2971"><b>JEFFRI MAKAHEKING</b></td> <td data-bbox="684 2952 1044 2971" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN VII;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2971 684 2987"><b>SHERLY LUSIANA MAKAHEKING</b></td> <td data-bbox="684 2971 1044 2987" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN VIII;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 2987 684 3006"><b>JEFFY JULIANTO MAKAHEKING</b></td> <td data-bbox="684 2987 1044 3006" style="text-align: right;"><b>Sebagai TERLAWAN IX;</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="637 3006 684 3022"><b>SUPRAYOGI</b></td> <td data-bbox="684 3006 1044 3022" style="text-align: right;"><b>Sebagai TURUT TERLAWAN;</b></td> </tr> </table> | <b>DR. KUASA, S.H.,</b> | <b>Sebagai PELAWAN;</b> | <b>CLARA SIWY BA</b> | <b>Sebagai TERLAWAN I;</b> | <b>FREDDY JEFFERSON SIGALARKI</b> | <b>Sebagai TERLAWAN II;</b> | <b>NEELTYE PARANTU</b> | <b>Sebagai TERLAWAN III;</b> | <b>CHRISTINA A.D SIWY</b> | <b>Sebagai TERLAWAN IV;</b> | <b>HERMAN LEWU RIKSY SIWY</b> | <b>Sebagai TERLAWAN V;</b> | <b>MICHAEL EDWIN GUSTAAF V SIWY</b> | <b>Sebagai TERLAWAN VI;</b> | <b>JEFFRI MAKAHEKING</b> | <b>Sebagai TERLAWAN VII;</b> | <b>SHERLY LUSIANA MAKAHEKING</b> | <b>Sebagai TERLAWAN VIII;</b> | <b>JEFFY JULIANTO MAKAHEKING</b> | <b>Sebagai TERLAWAN IX;</b> | <b>SUPRAYOGI</b> | <b>Sebagai TURUT TERLAWAN;</b> |
| <b>DR. KUASA, S.H.,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sebagai PELAWAN;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>CLARA SIWY BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sebagai TERLAWAN I;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>FREDDY JEFFERSON SIGALARKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sebagai TERLAWAN II;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>NEELTYE PARANTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sebagai TERLAWAN III;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>CHRISTINA A.D SIWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sebagai TERLAWAN IV;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>HERMAN LEWU RIKSY SIWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sebagai TERLAWAN V;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>MICHAEL EDWIN GUSTAAF V SIWY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sebagai TERLAWAN VI;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>JEFFRI MAKAHEKING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sebagai TERLAWAN VII;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>SHERLY LUSIANA MAKAHEKING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sebagai TERLAWAN VIII;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>JEFFY JULIANTO MAKAHEKING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sebagai TERLAWAN IX;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <b>SUPRAYOGI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sebagai TURUT TERLAWAN;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <p>Selanjutnya diberitahukan bahwa atas gugatan tersebut ia/mereka dapat mengambil tunjangan surat gugatan Penggugat di Kantoran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Buntar Besar Raya Nomor 24-26-28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kepadanya diberitahukan pula bahwa atas gugatan tersebut ia/mereka dapat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diserahkan pada hari persidangan tersebut diatas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <p>Demikian Pekerjaan ini saya jalankan melalui Iktel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |
| <p style="text-align: right;"><b>Jurusita Pengganti Tsb,</b><br/> <b>T.i.d</b><br/> <b>DIAN ARIA ACHYANI, SH</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                      |                            |                                   |                             |                        |                              |                           |                             |                               |                            |                                     |                             |                          |                              |                                  |                               |                                  |                             |                  |                                |



**MAKHLAMAH AJING REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGADILAN INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI BANGUN**  
**PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
Jl. Pemuda No. 81, RT. 001, RW. 002, Mangrove Kecamatan Kota Selatan Kota Bekasi Jawa Barat 17141  
Website : [www.pn-bekasi.go.id](http://www.pn-bekasi.go.id) Email : [info@pn-bekasi.go.id](mailto:info@pn-bekasi.go.id)

---

# RELAAS PANGGILAN SIDANG

**Nomor : 17/Pdt.G/2026/PN Bks**

Pada hari ini **KAMIS tanggal 05 Februari 2026**, saya **RINA SULISTIOWATI**, Juruista Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi ;

**TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :**

**PT. ANUGERAH DUTA MANDIRI** beralamat di Jl. Raya Pekayon, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.

Agar selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT;**

Agar ia/mereka datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, Di Jl. Pangrangan Jakarta RT. 004 RW. 003 Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, nanti pada hari :

**HARI : SELASA, TANGGAL 03 MARET 2026, Jam : 09.00 WIB.**

Pelunya hadir dipersidangan tersebut dalam pemeriksaan perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2026/PN Bks., dalam perkara antara :

|                                  |                     |                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>M. FATKHI ESMAR</b>           | ----- Sebagai ----- | <b>PENGGUGAT;</b> |
|                                  | <b>LAWAN</b>        |                   |
| <b>PT. ANUGERAH DUTA MANDIRI</b> | ----- Sebagai ----- | <b>TERGUGAT;</b>  |

Selanjutnya diberitahukan pada keduanya bahwa ia/mereka dapat mengambail salinan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan jam kerja, serta atas gugatan tersebut ia/mereka dapat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang ditanjangkannya atau Kuasanya yang sah dan diserahkan pada hari jawaban tersebut diatas.

Oleh karena alasan pihak Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka pekerjaan panggilan sidang ini saya laksanakan melalui Surat Baku Harian Rakyat Merdeka yang terbit di Bukota Jakarta, Bekasi dan sekitarnya dan kepada khlayak ramai/umum yang mengetahui kebenarannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah Risalah Panggilan sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya Juruista Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi

**JURUSITA PENGGANTI**

**t.t.d**

**RINA SULISTIOWATI**



USAHA ANDA  
BELUM  
LAKU

PASANG  
IKLAN  
ANDA  
DISINI!

HOTLINE  
**021-53699507**

   

 **Rakyat Merdeka**



KAMIS PON

• 5 FEBRUARI 2026

• 17 SYABAN 1447 H

• 17 RUWAH 1959

NBA

Clippers Lepas James Harden



James Harden (kiri)

BURSA transfer NBA kembali memanas setelah Los Angeles Clippers resmi menukar James Harden ke Cleveland Cavaliers. Dalam kesepakatan tersebut, Clippers mendapatkan Darius Garland serta satu pilihan putaran kedua draft sebagai bagian paket pertukaran.

Kepindahan ini menandai kembalinya Harden ke Wilayah Timur di tengah salah satu musim produktifnya dalam beberapa tahun terakhir.

Guard berusia 36 tahun itu mencatat rata-rata 25,4 poin per gim musim ini, tertinggi sejak musim 2019–2020 ketika ia membukukan rata-rata 34,3 poin.

Harden menjadi bagian penting dalam kebangkitan performa Clippers setelah memulai musim dengan rekor buruk 6-21. Kontribusinya membantu tim kembali bersaing di zona playoff dan play-in.

Pelatih Clippers Tyrronn Lue mengakui peran besar Harden selama membela timnya dalam tiga musim terakhir.

“Dia sangat berarti bagi

tim kami dan kami telah melihatnya selama tiga tahun terakhir. Siapa yang tidak ingin memiliki James Harden?” ujar Lue ketika kabar pertukaran mulai mencuat, seperti dikutip dari ESPN, kemarin.

Musim panas lalu, Harden memilih tidak mengambil opsi tahun terakhir kontraknya, lalu menandatangani kesepakatan baru senilai 81,5 juta dolar AS (sekitar Rp 1,3 triliun) untuk dua musim. Namun kontrak musim 2026–2027 bersifat opsi pemain, sehingga secara efektif ia hanya terikat jangka pendek.

Sebelum ditukar, Harden juga tampil solid dengan rata-rata 22,8 poin, 5,8 rebound, dan 8,7 assist, serta kembali masuk jajaran All-Star NBA untuk pertama kalinya sejak 2020.

Bagi Cavaliers, kedatangan Harden dipandang sebagai langkah agresif untuk memperkuat peluang juara dalam waktu dekat. Ia akan dipasangkan dengan bintang utama Donovan Mitchell, membentuk duet guard berpengalaman dan produktif. ■ DNU

ZONA SPORT

KEJUARAAN BULU TANGKIS BEREGU ASIA 2026

Srikandi Merah Putih Tekuk Hong Kong 3-1

Tim bulu tangkis putri Indonesia sukses membungkam Hong Kong pada laga Grup X Kejuaraan Beregu Asia 2026 di Qingdao Conson Gymnasium, China, Rabu (4/2/2026).

KEMENANGAN srikandi Merah Putih dipastikan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum yang turun di partai keempat. Alhasil, Indonesia menang 3-1 dari Hong Kong.

Rachel/Febi harus berjuang ekstra keras saat menghadapi pasangan Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan. Mereka menang lewat drama tiga gim dengan skor 21-

23, 21-18, dan 21-11.

Rachel mengakui pertandingan berjalan sangat ketat sejak awal. Ia menyebut ketenangan menjadi kunci utama mereka bisa membalikkan keadaan setelah sempat kalah di gim pertama.

“Kami mencoba tidak terburu-buru untuk menyerang,” ujar Rachel dalam keterangan resmi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Febi menambahkan bahwa pertahanan mereka memang sempat goyah di awal laga. Komunikasi di lapangan menjadi bahan evaluasi penting untuk menghadapi laga selanjutnya.

“Defense kami di gim pertama masih kurang rapi,” kata Febi singkat. Sebelumnya, Indonesia sempat

tertinggal 0-1 setelah tunggal pertama Thalita Ramadhani Wiryan kalah. Namun, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Indonesia berbalik unggul berkat kemenangan Mutiara Ayu Puspitasari di partai ketiga. Rachel/Febi kemudian menyempurnakan kemenangan tersebut di partai keempat.

Selanjutnya, Indonesia akan menantang Jepang untuk memperebutkan status juara Grup X. Rachel menegaskan timnya siap tempur habis-habisan jika kembali dipercaya turun.

“Pertandingan melawan Jepang akan menentukan juara grup. Jika diturunkan, kami siap,” tegas Rachel. ■ SAR



Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum

TES PRAMUSIM SEPANG

Terjatuh, Quartararo Patah Jari Tangan

FABIO Quartararo terpaksa menghentikan lebih awal rangkaian tes pramusim MotoGP di Sirkuit Sepang, Malaysia. Ia mengalami patah jari tengah tangan kanan akibat kecelakaan pada hari pertama pengujian.

Insiden tersebut menjadi pukulan awal bagi persiapan pembalap Yamaha Factory Racing menjelang musim baru.

Celakaan terjadi sekitar satu jam setelah sesi tes dimulai. Quartararo terjatuh di Tikungan 5 saat mengendarai prototipe terbaru Yamaha M1. Usai insiden, pembalap asal Prancis itu langsung dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan awal.

Pada mulanya, ia hanya mengeluhkan nyeri di bagian lengan dan sempat kembali turun ke lintasan pada sesi sore. Namun setelah evaluasi lanjutan, diketahui terdapat patah tulang pada jari tengah tangan kanannya. Tim kemudian memutuskan menghentikan partisipasinya untuk sisa dua hari tes di Sepang agar fokus pada pemulihan.

“Lengan sedikit sakit, tapi jari patah, jadi kami memutuskan untuk menghentikan dua hari tes berikutnya. Saya pikir itu yang terbaik,” ujar Quartararo seperti dikutip dari *MotorSport*, kemarin.

Ia menambahkan bahwa melanjutkan tes tidak memberi manfaat signifikan dibanding risiko memperparah cedera. “Jika ini akhir pekan balapan, saya bisa ikut, tapi tidak ada gunanya melakukan dua hari lagi,” ujarnya.

Quartararo menjelaskan kecelakaan dipicu hilangnya grip bagian depan motor dalam kecepatan tinggi. Benturan tergolong keras, namun ia bersyukur tidak mengalami cedera yang lebih serius. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan dilakukan di Barcelona untuk menentukan apakah diperlukan tindakan operasi.

“Jari ini cukup patah, jadi ka-

mi akan melakukan pemeriksaan besok atau lusa di Barcelona. Dampaknya besar, tapi untungnya hanya beberapa bagian yang rusak,” katanya.

Meski mengalami cedera, Quartararo tetap mencatatkan 14 putaran pada sesi sore dengan waktu terbaik 1 menit 57,869 detik. Catatan itu menempatkannya di posisi kesembilan hari tersebut dan menjadi pembalap Yamaha tercepat, unggul beberapa posisi dari Jack Miller dari tim Pramac Yamaha.

Sebelum insiden, Quartararo telah menjalani program pengujian penting terhadap paket motor Ya-

maha M1 versi terbaru, termasuk evaluasi awal mesin dan perangkat elektronik. Status konsesi Yamaha di Grup D juga memberi jatah waktu lintasan lebih banyak dibanding sebagian rival, sehingga sebagian besar agenda utama disebut sudah terpenuhi.

Meski demikian, absennya Quartararo pada sisa tes tetap menjadi kerugian bagi Yamaha, terutama untuk penyempurnaan setelan elektronik dan pemetaan mesin. Tim kini berharap proses pemulihan berjalan cepat agar sang juara dunia 2021 itu dapat kembali fit sebelum rangkaian balapan pembuka musim.■ DNU

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk** selaku pemegang Hak Tanggungan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV** terhadap aset debitor/ penjamin hilang atas nama **CV. Global Mitra Persada** berupa :

Satu Bidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 555 tanggal 4 Maret 1982, SU No. 12/ 1007/1982, Luas 128m², An. 1, Widjaja Soesilo, 2,Indriyanti Susilo, 3,Indriyani Susilo, Terletak di Jl. Petak VIII No. 52 RT 007 RW 005 No 55 Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota. Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Nilai Limit : Rp. 1.050.000.000,-  
Nilai Jaminan : Rp. 265.000.000,-

Pelaksanaan Lelang :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Februari 2026  
Waktu : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 19 Februari 2026 Pukul 11.00 WIB (Sesuai waktu server)  
Alamat Domain : lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta.  
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

**Syarat dan tata cara pelantikan :**

1. Penawaran Lelang dilakukan dengan dan tanpa kehadiran peserta penawaran terbuka (*E-Auction Open Bidding*) yang dijangkau pada domain <http://www.lelang.go.id/>. Tata cara dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <http://www.lelang.go.id/> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyertor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
5. Harga penawaran belum termasuk bea lelang sebesar 2% dan tunggakan pajak / denda apabila ada, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
6. Pemegang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;
7. Peserta lelang diwajibkan melunasi, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang, sesuai apa adanya (kondisi as is);
8. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta IV dan atau Bank BJB Cabang Kabupaten Tangerang;
9. Keterangan lebih lanjut hubungi Bank BJB Cabang Kabupaten Tangerang Telepon (021) 2967070 atau KPKNL Jakarta IV Telepon (021) 3448363.



Tangerang, 05 Februari 2026

**PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk**



Cabang Kabupaten Tangerang

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

PT. Bank OCBC NISP, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor akan melaksanakan Lelang terhadap aset debitor atas nama **SAHALA ANDRE ALEXANDER NAPTUPULU**, berupa :

• Sebidang tanah, bangunan, dan turutannya sesuai SHM No. 8994 /Katulapa, seluas LT 276 m2, atas nama **EKO BUDI PRAYOGI**, terletak di Blok B1 No.10, Kelurahan Katulapa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Perumahan Grand Padjajaran Residence Blok B1 No.10.

(Limit Lelang Rp. 4.061.250.000,- ; Uang Jaminan Rp. 1.625.000.000,-)

**Deskripsi Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Februari 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 19 Februari 2026, Pukul 09:40 WIB (Sesuai waktu server)  
Alamat Domain : lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kpklr Bogor, Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor, Ruang E-Auction  
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

**Deskripsi Persyaratan Lelang :**

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi “.jpg”.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diperorangan diwajibkan mengunggah Surat Kuasa Notaris/ disahkan Notaris dalam 1 (satu) file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyertorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.
5. Pemegang lelang akan dikenakan bea lelang sebesar 2 % dari pokok lelang.
6. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatikan sebagai penjaminan lain-lain.
7. Pemegang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi, KPKNL Bogor atau Asset Recovery Management Division PT. Bank OCBC NISP Tbk. Telp.021-25533888.



Bogor, 05 Februari 2026

**PT. Bank OCBC NISP, Tbk**



**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

PT. Bank OCBC NISP, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I akan melaksanakan Lelang terhadap aset debitor atas nama **SAHALA ANDRE ALEXANDER NAPTUPULU**, berupa :

• Sebidang tanah, bangunan dan turutannya Hak Milik Nomor 9011/Sukapura, seluas 130 m2, atas nama **SAHALA ANDRE ALEXANDER NAPTUPULU**, terletak di PT. (Persero) Pelindo II Perum Karyawan Sukapura Blok A2 No.3C, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Setempat dikenal juga dengan Perum. Imperial Gading, Type ST Albert Luxury, Kemp. Perum Pelindo II Blok A2 No. 3C. NCP: 31.75.040.001.0238.0904.0 (Limit Lelang Rp. 1.808.500.000,- ; Uang Jaminan Rp. 400.000.000,-)

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara Penawaran              | : Open Bidding                                                                                                                |
| Hari, Tanggal               | : Kamis, 19 Februari 2026                                                                                                     |
| Waktu Penawaran             | : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran                                                                |
| Batas Akhir Waktu Penawaran | : Kamis, 19 Februari 2026, Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)                                                              |
| Alamat Domain               | : lelang.go.id                                                                                                                |
| Tempat Lelang               | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat 10410 |
| Penetapan Pemenang          | : Setelah Batas Akhir Penawaran                                                                                               |
| Bea Lelang Pembeli          | : 2 % dan pokok lelang                                                                                                        |

**Syarat-syarat bagi Peserta Lelang :**

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain lelang.go.id dengan penawaran open bidding. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file ekstensi “.jpg”.png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut).
3. Peserta lelang diwajibkan menyertorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang, disetor sekaligus (bukan dicicil).
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, pembatalan/pengunduran pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Jakarta I dan PT. Bank OCBC NISP Tbk.
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara.
6. Pemegang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta atau dapat dilihat pada akun peserta lelang.
7. Pemegang lelang, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang berlaku sejak 5 Januari 2024 berlaku ketentuan NPWP yang menjadi dasar pengenaan PBHT Lelang yang digunakan adalah yang terterinci diantara nilai transaksi dan NUOP tahun terjadinya transaksi vide Pasal 46 ayat (3) UU HKPD.
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi, KPKNL Jakarta I atau Asset Recovery Management Division PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Telp.021-25533888.



Jakarta, 05 Februari 2026

**PT. Bank OCBC NISP, Tbk**





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**  
PROVINSI BANTEN  
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling. 5, Kota Tangerang 15117,  
Telp. (021) 5523272 Email: Kot-Tangerang@artgpn.go.id

**PENGUMUMAN**  
**TENTANG SERTIPKAT HILANG**  
**Nomor : 7 / PHP / BPN. KOTA I / II / 2026**

Untuk mendapatkan Sertipkat yang baru sebagai pengganti Sertipkat yang Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

| No | Nama /<br>Alamat<br>Pemohon                                                                                        | 1. Jenis dan<br>Nomor Hak<br>2. G/SU<br>Nomor/Tahun<br>3. Luas (M2) | NIB   | Terdaftar Atas Nama | Tanggal<br>Pembukuan | Letak Tanah<br>a. Jalan<br>b. Kelurahan<br>c. Kecamatan | KETERANGAN                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>SAINAN</b><br>Kp. Kebon Kecap<br>RT/RW. 003/012<br>Kel. Kampung Besar<br>Kec. Teluk Naga<br>Kabupaten Tangerang | 1. HM: 2015<br>2. SU. 10.25.06.01.<br>02231/1998<br>3. Luas 171 M²  | 02231 | <b>LIM ENG TAI</b>  | 21-03-1998           | a. Blok. RT 02,<br>RW 08<br>b. Benda<br>c. Benda        | 1. Pernyataan dibawah Sumpah/<br>Janji tanggal 09/01/2026<br>2. Surat Keterangan Hilang<br>S.Kel/23/IV/RES.1.24 /<br>2025/Reskrim<br>Tanggal.05/05/2025 |

Tangerang, 2 Februari 2026

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Tangerang

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Ttd

Joko Satrianto Wibowo, SH., M.H.  
NIP. 19900515 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**  
PROVINSI BANTEN  
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling. 5, Kota Tangerang 15117,  
Telp. (021) 5523272 Email: Kot-Tangerang@artgpn.go.id

**PENGUMUMAN**  
**TENTANG SERTIPKAT HILANG**  
**Nomor : 6 / PHP / BPN. KOTA I / II / 2026**

Untuk mendapatkan Sertipkat yang baru sebagai pengganti Sertipkat yang Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :

| No | Nama /<br>Alamat<br>Pemohon                                                                                                 | 1. Jenis dan<br>Nomor Hak<br>2. G/SU<br>Nomor/Tahun<br>3. Luas (M2) | NIB   | Terdaftar Atas Nama | Tanggal<br>Pembukuan | Letak Tanah<br>a. Jalan<br>b. Kelurahan<br>c. Kecamatan | KETERANGAN                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>HERRY SUTRISNO</b><br>Jl. Karyawan Raya No. 20/29<br>RT/RW. 004/001<br>Kel. Sukasari<br>Kec. Tangerang<br>Kota Tangerang | 1. HM: 2017<br>2. SU. 10.25.06.01.<br>02233/1998<br>3. Luas 204 M²  | 02233 | <b>LIM TA LIH</b>   | 21-03-1998           | a. Blok. RT 02,<br>RW 08<br>b. Benda<br>c. Benda        | 1. Pernyataan dibawah Sumpah/<br>Janji tanggal 09/01/2026<br>2. Surat Keterangan Hilang<br>S.Kel/24/IV/RES.1.24 /<br>2025/Reskrim<br>Tanggal.05/05/2025 |

Tangerang, 2 Februari 2026

An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Tangerang

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Ttd

Joko Satrianto Wibowo, SH., M.H.  
NIP. 19900515 201801 1 001

Subscribe & Dengarkan Obrolan

Santai Kami Bersama Narasumber

Hebat di Spotify RM.id





IKLAN BARIS

BARANG HILANG

KARIR

JUAL BELI

PROPERTI

UMKM

Pemassangan Iklan Hubungi : Sdr. Puti Telp. (021) 53695507 Ext. 704,706,707 Fax (021) 5333156, Sdr. Joko (021) 6345477 Fax. (021) 63865686, Sdr. Anang : (021) 70013411, 84977465 Fax. (021) 84977465.

**KEHILANGAN**

**Hilang BPKB** Mobil Eriga 2020 Abu2 metalik, B2676SRK. Noka MHYANC22SLJ114647. Noka K15B71206958A.NUNZILA

(Zakir/S2)

**Hilang BPKB** mbl SUZUKI IGNIS, 2018.Merah Metalik, B1394SMI, Noka:MA3NFG81S30178203 Nosin. K12MN4471362 An.Nia Damiani

(Zakir/S2)

**HLG BPKB** ST 150 pickup SUZUKI, Hitam, B 9714 UUA, Noka MHYESL415FJ733927, Nosin G15AD1019676 An.Kopkar Syahbandar Tri.Priok

(Zakir/S2)

**Hilang BPKB** mbl honda BR-V 2021 (nopol D 1387 AIY) Nosin : L15Z164 30331 Noka: MHRD1G1870MJ150146 atas nama Enggar Shulistyo P.

(Sofwan/S2)

**Hilang BPKB & STNK** Motor Beat B 4846 SCS, Noka: MH1JM1110HK 195730 Nosin: JM11E1188332 A/n Im-roatun Nahdiyah

(Sofwan/S2)

**HILANG BPKB HONDA** PCX 2019 (NOPOL: B 5386 TDH) NOS- IN : KF21E1224864 NOKA : MH1- F2114KK225209 ATAS NAMA: SAMSU RIZAL

(ndro/S2)

**TELAH HILANG** Verponding Indonesia no.296/289 tahun 1955-1959 dan A3B No.10101/IV/JB/1977 Jln. Kampung Bali Gg.8 No.3 RT12/RW08 Luas Tanah 91m2 antara penjual Moh. Ali Bin Jaani dengan pembeli Mariani Binti Mayu,Jakarta Pusat.

(Hasan/S2)

**TELAH HILANG** BPKB SEPEDA MOTOR Honda (PCX 160) Tipe : V1J02Q32L1 A/T, Nopol : B5824 KHA, Nomor Rangka : MH1K-F7110RK981627, Nomor Mesin : KF71E198178, NOMOR BPKB : V02722161 a/n Yuni Wahyuningsih.

(Hasan/S2)

**TELAH HILANG** BPKB Mobil MITSUBISHI COLT FE74S(4x2) Nopol: B9541TPA Nomor Mes-in: 4D34TG80684 Nomor Rangka: MHMFE74P4BK052947 An Muham-mad Yani.

(Hasan/S2)

**HLG BPKB** Daihatsu Grandmax/ S401 RP HA Nopol : B 9878 SAC NR: MHPK3BA1 JDK070523 NM: MD13818 An. PT. Security Service Indonesia

(amir/S2)

**HLG BPKB** NISSAN GRAND LIVINA, HERNAWATI, BA 1768 AZ, No.Ka: MHBG-1CG2F7J003087, NoSin: MR18016229R, ORANGE MET

(amir/S2)

**HLG BPKB** KIJANG INNOVA G M/T, ADILARTI DIAH, BA 1792 QY, NoKa: MHFJW8EM6J2363233, NoSin: 1TRA560891, HITAM METALIK

(amir/S2)

**TELAH HILANG** 2 buku AJB No. 265/ kec.Pamulang/2005 an. SULARNO KARSORJO & AJB No.590/3633/JB/ kec.CPT/1990 an. AMINAH RACHMAT. (Ttd. RENY SIMAMORA)

(amir/S2)

**Hilang SHM** No 28050701.1.02459 Kel Karawaci Baru. An: Miftakhul Huda- Rita Syap Reni. Luas tanah: 90m2. Terletak di Jl. Gu-rame 5 No 54, Karawaci baru, Karawaci. Tangerang

(amir/S2)

**HLG BPKB** STRADA GLX, ILHAM YDA PUTRA, BA 8252 QG, NoKa: MMBJNK-B70CD055716, NoSin: 4M40UAD1270, ABU PERAK METALIK

(sand/S2)

**HLG BPKB**, KR 150 K, ADI MANS-UR HASUGIAN, BA 4171 BI, NoKa: MH4KR150KCKP70359, NoSin: KR150KEP69137, HIJAU

(sand/S2)

**HLG BPKB** COLT DIESEL, US-MAN, BA 8295 YU, NoKa: MHM-FE74P5BK059184, NoSin: 4D34TG08678, KUNING

(sand/S2)



Crazy World

Gembok Kode Nyangkut Di Hidung Bocah Laki-laki

SEORANG bocah laki-laki asal China jadi bahan tertawaan netizen. Fotonya viral di internet dengan kondisi gembok kode tersangkut di hidungnya.

Para petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) di Huaihua, Provinsi Hunan, China, dibuat geleng-geleng kepala dengan kejadian ini.

“Kasus gembok yang tersangkut seperti ini hampir tidak pernah terjadi,” ungkap salah satu petugas sebagaimana dikutip *Oddity Central*, Selasa (27/1/2026).

Petugas merahasiakan identitas dan usia anak tersebut. Namun dari beberapa foto yang beredar, usia anak tersebut diperkirakan tidak lebih dari 10 tahun.

Tidak ada yang tahu bagaimana bocah tersebut bisa memasukkan gembok kecil ke dalam hidungnya. Banyak yang menduga, dia meniru tokoh Bull Demon King. Tanpa sengaja membuat gembok itu tersangkut dan menyerupai cincin hidung.



FOTO ODDITY CENTRAL

Inilah kondisi hidung yang dipasang gembok.

Beberapa kali bocah itu mencoba melepaskan sendiri, tapi gagal. Akhirnya, bocah itu meminta bantuan orang tuanya. Namun, orang tuanya tidak berani memaksa, khawatir menyebabkan cedera parah pada hidung anak tersebut.

Keluarga itu kemudian meminta bantuan Damkar. Petugas memotong gembok menggunakan alat khusus. Selama proses penyelamatan berlangsung, si bocah bersikap tenang.

Setelah gembok berhasil dilepas, dia berjanji tidak akan memasukkan lagi benda asing ke dalam hidungnya. ■ **LDU**

Jelang Pemilu Di Jepang PM Takaichi Sukses Menarik Pemilih Muda

PADA tiga bulan pertama kepemimpinannya, Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi dinilai jago merangkul pemilih muda, dibanding pendahulunya.

PM perempuan pertama Jepang ini aktif menggunakan media sosial (medsos). Hampir setiap hari, dia memposting kegiatan di akun X pribadinya.

Tidak hanya itu, Takaichi juga jago memainkan drum. Ini dibuktikan saat kunjungan Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung ke Jepang pada 13 Januari 2026. Dia memainkan lagu *K-Pop Demon Hunter* bersama PM Italia Giorgia Meloni pada 17 Januari 2026.

Tidak hanya itu, Takaichi juga terlihat luwes mengambil foto *selfie* bersama PM Italia Giorgia Meloni pada 17 Januari 2026.

Pernak pernik seperti tas dan pulpen Takaichi juga terlihat *girly* dengan pilihan warna pink pastel. Hal ini membuatnya jauh lebih menarik dibanding para pendahulunya yang merupakan politisi pria tua dan kaku.

Sejauh ini, Takaichi telah berhasil menarik perhatian kaum muda Jepang. Namun, banyak yang penasaran apakah cara Takaichi dapat membawa kemenangan bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) di Pemilu pada 8 Februari 2026.

“Rasanya Jepang telah berubah,” ujar mahasiswa berusia 21 tahun, Genki Takahashi, usai menghadiri kampanye Takaichi di Nara pada Selasa (3/2/2016). “Jepang telah beralih dari tradisi kaku ke inovasi,” simpulnya.

Dalam beberapa jajak pendapat baru-baru ini, dukungan untuk Takaichi dari pemilih dengan rentang usia 18-29 tahun hampir mencapai 90 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang cuma meraup 38 persen. Sementara, Fumio Kishida mendapat dukungan sebesar 51 persen.

“Saya pikir dia sangat pandai memasarkan dirinya sendiri,” sebut pendukung Takaichi,

Kenshiro Kawasaki (24).

Generasi muda, lanjut Kawasaki, sangat peka terhadap strategi citra politisi dan memilih mulai bosan dengan beberapa perdana menteri terakhir.

Seorang ibu rumah tangga, Hitomi Sasaki, yakin bahwa Takaichi memiliki kebijakan yang jelas dalam memimpin Jepang. “Dia memiliki kemauan yang kuat untuk melindungi Jepang. Saya sepenuhnya mendukungnya,” tegasnya.

Menurut analisis yang dilakukan situs data politik *Senkyo.com* pada November 2025, jumlah penayangan video YouTube terkait Takaichi jauh melebihi jumlah penayangan partai politik antara Juli 2025 dan November 2025.

Ketika Takaichi menjabat pada Oktober 2025, angka pencarian YouTube untuk Takaichi naik tiga kali lipat lebih besar.

Menurut profesor politik di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, Daniel Smith, dunia politik Jepang sangat bersifat dinasti. Sekitar 30 persen anggota parlemen di Negeri Matahari Terbit adalah politisi turun-temurun. Namun, Takaichi tidak datang dari keluarga politisi. Janjinya untuk “bekerja, bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja” dibuktikan ketika menjabat. Salah satunya, Takaichi rapat sejak dini hari.

“Saya mengamati dengan saksama bagaimana kaum muda mendukung pemerintahan Takaichi akhir-akhir ini,” ujar warga Tokyo Masato Iwanaka (21).

Menurut jajak pendapat yang dikeluarkan surat kabar *Asahi* pada 1 Februari 2026, Partai Demokrat Liberal (LDP) kemungkinan akan memenangkan mayoritas mutlak dengan 233 kursi dari total 465 kursi di Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat) Jepang. Jumlah tersebut akan meningkat dari 198 kursi saat ini.

Sedangkan partai oposisi terbesar, Aliansi Pusat Reformasi, dalam kesulitan dan bisa kehilangan setengah dari 167 kursinya. ■ **DAY**

HELLO AMBASSADOR

Luncurkan Program Climate Finance Accelerator

DUTA Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey meluncurkan program *Climate Finance Accelerator* (CFA) di Jakarta, Senin (2/2/2026). Program ini untuk mempercepat pembiayaan proyek rendah karbon dan memperkuat upaya pencapaian target *net zero* emisi pada 2060.

CFA merupakan program bantuan teknis global yang didanai Pemerintah Inggris untuk mempertemukan pelaku usaha dengan investor, sekaligus memperkuat implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/2/2026), Dubes Jermey mengatakan, CFA telah mendukung lebih dari 200 bisnis di berbagai negara dan memfasilitasi kesepakatan investasi senilai lebih dari 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 6,7 triliun.

Menurutnya, kehadiran CFA di Indonesia memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Inggris dalam aksi iklim global.

“Saya senang program yang sangat sukses ini kini hadir dan meluncurkan siklus pertamanya di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Inggris memahami bahwa bisnis iklim di Indonesia yang mencari pendanaan masih menghadapi berbagai tantangan untuk menarik investasi.

Dubes pecinta sambal ini menambahkan, peluncuran CFA juga menjadi bagian dari penguatan Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia yang sebelumnya disepakati Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto di London.

CFA dibuka 2 Februari hingga 9 Maret 2026. Bisnis-bisnis yang ingin *apply* harus membutuhkan investasi minimum 3 juta dolar

AS (Rp 50,2 miliar).

Bagi mereka yang lolos seleksi, akan menerima dukungan selama 3-4 bulan agar meningkatkan peluang mendapatkan investasi. Berupa sesi kelompok dan pendampingan dari pakar finansial, teknis, serta kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi.

Ada 10 bisnis akan dipilih dari sektor energi, limbah, pertanian, transportasi, proses industri dan penggunaan produk, serta kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Presiden Direktur PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting Indonesia Martijn Peeters mengatakan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan CFA di Indonesia.

PwC berperan sebagai mitra implementasi yang akan mendampingi peserta menyusun proposal investasi yang menarik dan bernilai komersial. ■ **DAY**



FOTO KEDUBES INGGRIIS

Dubes Dominic Jermey (kiri) bersama Presiden Direktur PwC Consulting Indonesia Martijn Peeters pada peluncuran program *Climate Finance Accelerator* di Jakarta, Senin (2/2/2026).

RI Jadi Mitra Kunci Di Kawasan Indo-Pasifik

Slowakia Tawarkan Energi Nuklir & Teknologi Limbah

Di tengah panasnya tensi geopolitik global, jarak ribuan kilometer tak lagi jadi penghalang. Indonesia dan Slowakia kian merapatkan barisan.

MESKI berjauhan secara geografis, Jakarta dan Bratislava sepakat memperdalam kemitraan di sektor strategis sesuai kebutuhan nasional masing-masing. Pendidikan dan energi menjadi tumpuan utama kerja sama, sekaligus fondasi hubungan jangka panjang kedua negara.

Setelah penantian panjang selama 16 tahun, Indonesia dan Slowakia akhirnya kembali duduk satu meja. Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dengan Menlu Slowakia Juraj Blonar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026), menjadi kunjungan pertama Menlu Slowakia ke Indonesia sejak 16 tahun terakhir.

“Bagi Slowakia, hubungan dengan Indonesia memiliki fondasi historis yang kuat. Peningkatan status hubungan ini diharapkan menjadi awal era baru kerja sama kedua negara,” ujar Blonar dalam konferensi pers bersama.

“Saya benar-benar merasakan suasana yang sangat konstruktif dan positif antara kedua negara kita,” ujarnya.

Blonar mengunjungi Jakarta dan Bali pada 1-4 Februari 2025. Pertemuannya dengan Sugiono menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Slowakia yang telah terjalin lebih dari tiga dekade.

“Kami melihat Indonesia sebagai mitra kunci, terutama di kawasan Indo-Pasifik,” ucapnya.

Blonar menegaskan, pendidikan dipilih sebagai pintu masuk utama kemitraan strategis. Slowakia membuka peluang pertukaran pelajar, serta kerja sama riset dan pelatihan di bidang teknik dan rekayasa.

Menurutnya, negara berkem-

bang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor infrastruktur, kelistrikan, serta pengelolaan air dan limbah.

Pengalaman Slowakia di bidang tersebut sangat relevan untuk mendukung agenda pembangunan nasional Indonesia.

Tak hanya itu, Slowakia juga menawarkan kerja sama di sektor energi nuklir. Negara Eropa Tengah tersebut mengklaim memiliki pengalaman lebih dari 60 tahun dalam membangun, mengoperasikan, hingga menangani kecelakaan dan penonaktifan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Di bidang ekonomi, Indonesia dan Slowakia sepakat mengaktifkan kembali komisi bersama untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi. Indonesia pun mengundang investor Slowakia untuk bermitra, termasuk melalui Danantara.

Sugiono menyambut positif peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Dia menilai, banyak sektor potensial yang dapat dikembangkan bersama. Mulai dari riset, pertahanan hingga transisi energi. “Kami menyambut baik tawaran Slowakia untuk membentuk kemitraan strategis,” tegas Sugiono.

Salah satu contoh konkret kerja sama yang telah berjalan adalah kolaborasi penelitian antara Universitas Andalas dan universitas di Slowakia yang berhasil mengembangkan varietas gandum yang cocok ditanam di iklim tropis.

Di sektor pertahanan, kedua negara telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 2023 yang mencakup pelatihan, penelitian, pengembangan, produksi, hingga transfer teknologi.

Kerja sama ekonomi juga di-



FOTO KEMLU RI

**PEGANG DOKUMEN:** Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono (kanan) menerima kunjungan Menlu Slowakia Juraj Blonar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (3/1/2026).

perkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Badan Pengembangan Investasi dan Perdagangan Slowakia.

Sementara di sektor pariwisata, Slowakia melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Slowakia ke Tanah Air, Pemerintah Slowakia membuka peluang pendirian Konsulat Kehormatan di Bali.

“Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi kedua negara. Bali menjadi lokasi yang sangat strategis untuk memperkuat hubungan antarwarga,” kata Blonar.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menlu juga menandatangani

Nota Kesepahaman pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.

Di tengah penguatan kerja sama bilateral, Blonar menyinggung situasi global yang kian memanas. Dia mengingatkan, dunia saat ini menghadapi jumlah konflik tertinggi sejak Perang Dunia II akibat melemahnya hukum internasional.

Meski begitu, Slowakia menegaskan komitmennya bersama Indonesia untuk mendorong perdamaian global dan penyelesaian sengketa secara damai. Slowakia juga mengapresiasi dukungan Indonesia atas pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2028-2029.

Sebagai penutup, Blonar memastikan komitmen untuk menuntaskan perjanjian kemitraan strategis dan menandatangani di Slowakia, bersamaan dengan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap menyambut Presiden Indonesia di Slowakia sebagai bukti nyata penguatan hubungan kedua negara,” pungkasnya.

Terkait hubungan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia mendukung akses Slowakia ke dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), yang sejalan dengan Strategi Indo-Pasifik Slowakia dan berkontribusi pada penguatan sentralitas ASEAN. ■ **MEL**

| KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/<br>BADAN PERTANAHAN NASIONAL<br>KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG<br>PROVINSI BANTEN<br>Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, Kota Tangerang 15117,<br>Telp. (021) 5523272 Email: Kota.Tangerang@batpn.go.id |                                                                                                                                              |                                                                     |       |                     |                      |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENGUMUMAN<br>(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)<br>Nomor : 4 / PHP / BPN. KOTA / 1 / 2026                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                     |       |                     |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| Untuk mendapatkan Sertipikat yang baru sebagai pengganti Sertipikat yang Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :                           |                                                                                                                                              |                                                                     |       |                     |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| No                                                                                                                                                                                                                                               | Nama /<br>Alamat Pemohon                                                                                                                     | 1. Jenis dan<br>Nomor Hak<br>2. GRSU<br>Nomor/Tahun<br>3. Luas (M2) | NIB   | Terdaftar Atas Nama | Tanggal<br>Pembukuan | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SONNY AGUSTA</b><br>Cluster Puri Permata<br>RT/RW. 003/015<br>Kel. Larangan Selatan<br>Kec. Larangan<br>Kota Tangerang<br>Provinsi Banten | 1 HM-04337<br>2. SU 03588/<br>CIPADU<br>JAYA/2023<br>3. Luas 250M2  | 05005 | <b>SONNY AGUSTA</b> | 28-08-2023           | a. -<br>b. Cipadu Jaya<br>c. Larangan<br><br>1. Pernyataan dibawah<br>Sumpah/Jangi tanggal<br>23/01/2026<br>2. Surat Keterangan Hilang<br>S. Ket/103XIII/RES.1.24 /<br>2025/Reskrim<br>Tanggal. 01/12/2025 |
| Tangerang, 29 Januari 2026<br>An. Kepala Kantor Pertanahan<br>Kota Tangerang<br>Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran<br><br>Ttd<br><br>Joko Satrianto Wibowo, SH., M.H.<br>NIP. 19900515 201801 1 001                                      |                                                                                                                                              |                                                                     |       |                     |                      |                                                                                                                                                                                                            |

| KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/<br>BADAN PERTANAHAN NASIONAL<br>KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG<br>PROVINSI BANTEN<br>Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, Kota Tangerang 15117,<br>Telp. (021) 5523272 Email: Kota.Tangerang@batpn.go.id |                                                                                                                                                                 |                                                                     |       |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENGUMUMAN<br>(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)<br>Nomor : 5 / PHP / BPN. KOTA / 1 / 2026                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                     |       |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Untuk mendapatkan Sertipikat yang baru sebagai pengganti Sertipikat yang Hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa :                           |                                                                                                                                                                 |                                                                     |       |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No                                                                                                                                                                                                                                               | Nama /<br>Alamat Pemohon                                                                                                                                        | 1. Jenis dan<br>Nomor Hak<br>2. GRSU<br>Nomor/Tahun<br>3. Luas (M2) | NIB   | Terdaftar Atas Nama                                               | Tanggal<br>Pembukuan | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ARDIANTO REZA<br/>PAMUNGKAS, SH.</b><br>Jl. Pengadilan Blok C. 1/3<br>RT/RW. 003/013<br>Kel. Sukasari<br>Kec. Tangerang<br>Kota Tangerang<br>Provinsi Banten | 1 HGB-2176<br>2. SU 4844/<br>KETAPANG/2018<br>3. Luas 89M2          | 06949 | <b>PT CATUR MARGA<br/>UTAMA<br/>(Berkedudukan di<br/>Jakarta)</b> | 13-12-2018           | a. Jalan<br>Lake City<br>Jl. Australia 1<br>No. 25<br>b. Kelapang<br>c. Cipondoh<br><br>1. Pernyataan dibawah<br>Sumpah/Jangi tanggal<br>23/01/2026<br>2. Surat Keterangan Hilang<br>S. Ket/60/VIII/RES.1.24 /<br>2025/Reskrim<br>Tanggal. 21/08/2025 |
| Tangerang, 29 Januari 2026<br>An. Kepala Kantor Pertanahan<br>Kota Tangerang<br>Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran<br><br>Ttd<br><br>Joko Satrianto Wibowo, SH., M.H.<br>NIP. 19900515 201801 1 001                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                     |       |                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |

USAHA ANDA  
BELUM LAKU

PASANG IKLAN  
ANDA  
DISINI!

HOTLINE  
021-53699507

Rakyat Merdeka









Menghadiri Grammy Award 2026, rapper berusia 31 tahun ini mengkritik pemerintahan Donald Trump ugul-ugalan merazia imigran di Amerika Serikat. “Sebelum aku berterima kasih pada Tuhan, aku mau bilang ICE out. Kita bukan penjahat, kita bukan hewan, kita bukan *alien*, kita adalah manusia, dan kita adalah orang Amerika,” kata Bunny.

BAD BUNNY

FOTO: GETTY IMAGES

## Kylie Jenner Berencana Nikahi Timothee Chalamet

AKTOR peraih Golden Globes Timothée Chalamet mulai berani *go public* mengungkap hubungan asmaranya dengan bintang *reality show* Kylie Jenner. Bahkan, pasangan ini sudah merencanakan untuk berlanjut ke pelaminan.

“Wah, itu sangat pribadi. Itu sangat pribadi. Ya, ya (akan menikahinya),” ung-

kap Chalamet menjawab pertanyaan dalam sebuah wawancara saat promosi film terbarunya.

Meskipun gosip keretakan hubungan Jenner dan Chalamet sering kali muncul namun, sejoli itu semakin tak ragu menampilkan kemestaraan di publik. Bahkan, keduanya juga tinggal bersama di Los Angeles, Amerika Serikat, seperti layaknya sudah menikah.

■ MER



FOTO: INSTAGRAM/@KYLIEJENNER

## Sabrina Carpenter Dikritik Organisasi Pecinta Hewan

PENAMPILAN Sabrina Carpenter di Grammy Awards 2026 menuai kritik dari organisasi pecinta hewan *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA). Penampilan penyanyi 26 tahun itu dinilai melakukan aksi yang tidak peka terhadap kesejahteraan hewan.

Dalam salah satu bagian penampilannya membawakan lagu *Man-child*,

Carpenter muncul dalam konsep bertema penerbangan. Ia masuk ke dalam properti berbentuk pesawat mengenakan busana serba putih yang terinspirasi dari seragam pilot.

Dia terlihat memegang seekor burung merpati putih hidup. PETA mempertanyakan keputusan

Carpenter membawa hewan hidup ke atas panggung, di saat sudah banyak kalangan sadar mengenai isu kesejahteraan hewan.

■ MER



FOTO: INSTAGRAM/@SABRINACARPENTER

# Prilly Latuconsina Meminta Maaf Ke Pencari Kerja

Aktris Prilly Latuconsina meminta maaf secara terbuka kepada para pencari kerja yang tersinggung dan marah mengenai unggahannya sedang mencari kerja di *platform LinkedIn*. Ditegaskannya, dia tidak memiliki niat meremehkan perjuangan para pencari kerja.

PRILLY mendapatkan banyak kritik dari publik atas unggahan *#OpenToWork* di akun *LinkedIn* miliknya.

Tak lama setelah itu, Prilly langsung menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui video klarifikasi yang diunggah di *Instagram* pribadinya, Selasa (3/2/2026).

Dalam video, Prilly mengakui, unggahannya memicu rasa tidak nyaman, kekecewaan, hingga kemarahan sebagian masyarakat. Khususnya para pencari kerja yang tengah berjuang di tengah situasi ekonomi yang menantang. “Pertama-tama, aku minta maaf dengan tulus kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa nggak nyaman atau kesalahpahaman,” ujar Prilly, dikutip Rabu (4/2/2026).

Bintang film *Danur* itu menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat meremehkan perjuangan para pencari kerja yang memanfaatkan *LinkedIn* sebagai ruang profesional untuk mendapatkan penghasilan dan kesempatan kerja.

Ia menyadari, di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan, unggahannya dapat ditafsirkan secara sensitif oleh publik.

“Aku ingin menegaskan, sejak awal tidak pernah berniat untuk tidak bersikap sensitif. Apalagi tidak empati pada situasi yang banyak dihadapi orang-orang saat ini,” katanya.

Dalam klarifikasinya, kekasih Omara Esteghlal itu secara terbuka mengakui mendapat *privilege* karena figur publik. Ia menyadari, pengalaman hidup dan perjalanan kariernya sebagai artis berbeda dengan kebanyakan orang.

Kesadaran itu, menurut Prilly, menjadi pelajaran penting baginya untuk lebih berhati-hati dan memahami perspektif publik dalam berkomunikasi di ruang profesional.

“Aku sadar, posisiku dan pengalaman hidupku tidak sama dengan semua orang, dan aku mengerti kenapa hal ini bisa terasa menyakitkan bagi sebagian pihak,” ucapnya.

Menjawab tuduhan pencitraan, Prilly menjelaskan, penggunaan fitur *#OpenToWork* di *LinkedIn* tidak dimaksudkan sebagai tanda bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan tetap seperti kebanyakan pengguna *LinkedIn*.

Menurut Prilly, fitur itu dirinya gunakan untuk membuka peluang kolaborasi lintas industri dan memperluas jejaring profesional secara formal.

Ia juga menepis anggapan, dirinya mengambil “jatah” pekerjaan orang lain. Bagi Prilly, langkah tersebut merupakan bagian dari proses belajar dan pengembangan diri.

Meski demikian, Prilly menerima kritik publik yang menilai penggunaan fitur tersebut oleh dirinya kurang tepat. Ia mengakui, perlunya sensitivitas yang lebih tinggi dalam berinteraksi di *platform* profesional seperti *LinkedIn*.

Terkait akun *LinkedIn* miliknya yang sempat tidak bisa diakses, Prilly menyebut hal tersebut terjadi di luar kendalinya. Menurutnya, lonjakan aktivitas yang sangat tinggi setelah unggahan *#OpenToWork* menjadi penyebab akun tersebut mengalami kendala teknis.

“Saat ini sedang ditangani dan diupayakan agar aku bisa kembali mengaksesnya,” ujarnya.

Di akhir klarifikasinya, Prilly menegaskan komitmennya untuk terus melakukan kegiatan positif dan kerja sama yang memberi dampak baik bagi masyarakat.

Seperti diketahui, usai Prilly mengaktifkan fitur *#OpenToWork* di *LinkedIn*, permintaan koneksi terhadap akunnya melonjak hingga puluhan ribu akun.

Narasi yang ia sampaikan menuai protes banyak netizen. Keterangan Prilly panen permintaan koneksi dinilai kurang sensitif. Karena, banyak pencari kerja sudah lama tak mendapatkan permintaan koneksi dan respons tawaran kerja. ■ MER



FOTO: INSTAGRAM/@PRILLYLATUCONSINA96

Nia Ramadhani Bantah Gugat Cerai Suami

RUMAH tangga artis Nia Ramadhani mendadak jadi perbincangan warganet usai beredar kabar miring Nia disebut menggugat cerai suaminya, Ardi Bakrie.

Gossip pertama kali mencuat dari media sosial *TikTok* melalui sebuah akun bernama *@dede\_el108*. Dalam unggahannya, akun tersebut menyertakan narasi provokatif yang mengklaim Nia Ramadhani telah menggugat cerai Ardi Bakrie.

“Gawat!! Ardi Bakrie ketahuan selingkuh sama wanita ini? Nia Ramadhani minta cerai dan bilang gini,” demikian bunyi narasi yang tertulis dalam unggahan tersebut.

Menanggapi hal itu, asisten sekaligus sahabat Nia, Theresa Wienathan memastikan gosip tersebut tidaklah benar.

“Intinya hoaks,” tegas Theresa Wienathan. “Mereka baik-baik saja,” imbuhnya.

Sekadar informasi, Nia dan Ardi menikah pada 1 April 2010. Dan, pernikahan mereka sudah dikaruniai tiga orang anak. ■ TAR

FOTO: INSTAGRAM/@RAMADHANIABAKRIE

### SELEB TWITT

#### BERAGAM ALASAN, USIA SUDAH MATANG TAPI BELUM MENIKAH

Media sosial *platform X* lagi ramai membahas berbagai alasan orang belum memutuskan menikah meski usianya cukup matang. Keputusan itu dinilai terjadi karena banyak faktor. Mulai dari masalah ekonomi, kesiapan mental, belum bertemu jodoh dan trauma di masa lalu.



**Jejak @jejakkrasa27 (Selebtwit)**  
Percayalah, menikah bukan obat lelah, bukan jaminan bahagia, apalagi aman. Salah pilih pasangan, bisa jadi luka seumur hidup. Jadi pilihlah dengan hati, bukan karena takut sendiri.



**Daisy @daisy\_forever13 (Selebtwit)**  
Salah satu alasan aku belum mikirin soal nikah yaitu ekonomi.



**Tasha @aryemahsat (Selebtwit)**  
Di saat aku *single*, aku bisa mencukupi hidupku dan aku bahagia, jadinya emang belum punya alasan kuat buat nikah aja.



**Rudi Surachman @rudirockrachman (Selebtwit)**  
Belum nikah ya belum ada jodoh lah.



**Ing @xxzlingling (Selebtwit)**  
Takut nggak bisa bikin anak seneng.



**Riris Eriani @RirisEriani (Selebtwit)**  
Disuguhin kalau *ending*-nya cerai karena berbagai alasan, jadi malas nikah.



**Nindy @wnisekai (Selebtwit)**  
Emang dari segi ekonomi dan mental belum mampu.



**Jangmi @ppuingpp (Selebtwit)**  
Alasan utama belum nikah ya karena korban *broken home*.